

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN NELAYAN
DI PULAU BARRANG LOMPO KECAMATAN UJUNG TANAH
KOTA MAKASSAR**

ISRAENI JABIR

10564 529 09



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2016

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN NELAYAN
DI PULAU BARRANG LOMPO KECAMATAN UJUNG TANAH
KOTA MAKASSAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2016

PERSETUJUAN

Judul-Proposal : Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Nelayan Di Pulau Barrang Lompo Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar

Nama : Israeni Jabir

Nomor Stambuk : 10564 529 09

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Kampus : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyetujui :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Dra. Hj. Musliha Karim, M.Si


Rudi Hardi, S.Sos., M.Si

Mengetahui :

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan


Dr. H. Muhlis Madani, M.si


Luhur Prianto, S.IP, M.Si.

PENERIMAAN TIM

telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0446/FSP/A.I-VIII/I/37/2016 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam Program Studi Administrasi Negara di Makassar pada Hari Kamis tanggal 18 Februari Tahun 2016.

TIM PENILAI

Ketua Sekertaris

Dr. H. Muhlis Madani, M.Si **Drs. H. Muhammad Idris, M.Si**

Penguji :

1. **Dr. H. Muhlis Madani, M.Si** (.....)
2. **Drs. H. Anwar Parawangi, M.Si** (.....)
3. **Drs. Alimuddin Said, M.pd** (.....)
4. **Dr. Abdul Mahsyar, M.Si** (.....)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah memberikan nikmat berupa kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah pada baginda Rasullah saw. selaku sosok pendidik yang selalu mengajarkan tentang kebaikan semoga ajarannya bisa dijadikan referensi utama dalam setiap aktivitas kita. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafa'at di hari kemudian. Amin.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai hambatan, tantangan dan berbagai kekurangan. Namun berkat izin-Nya, akhirnya semua itu dapat diatasi oleh penulis dengan ketabahan, ketekunan, dan kerja keras serta bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sungguh patut menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak A. Luhur Aprianto, S.Ip., Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Dra. Musliha Karim, M.Si., Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya di sela kesibukan beliau untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini sampai tahap penyelesaian. Bapak Rusdi Hardi, S.Sos, M.Si., Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya di sela kesibukan beliau untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam upaya

penyusunan skripsi ini sampai tahap penyelesaian. Serta ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda dan ibunda tercinta yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayangnya serta keikhlasan dalam membesarkan, mendidik dan membiayai penulis serta doa restu yang tak henti-hentinya untuk keberhasilan penulis.
2. Bapak Dr. H. Irwan Akib, M.Pd., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. H. Muhlis Madani, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak dan ibu dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar atas segala arahan, petunjuk dan jasa-jasanya kepada penulis.
5. Terkhusus kepada Rusly dan Nirwana, S.Pd., yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat tersayang: Dian, Fitria, Sukma, yang selalu memberikan motivasi dan semangat serta selalu ada di saat suka maupun duka yang penulis alami.
7. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, terima kasih atas kebersamaan dan kebaikan kalian selama ini.

Terlalu banyak pihak yang berjasa kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, sehingga tidak akan termuat bila dicantumkan namanya satu persatu. Oleh karena itu, kepada mereka semua tanpa terkecuali penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga Allah swt. membalas semua

kebaikan dan jerih payah kita dengan pahalan yang melimpah dan tak terbatas.
Amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karenanya kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa penulis harapkan dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Akhirnya, penulis memohon kepada Yang Maha Kuasa semoga apa yang telah diberikan bernilai ibadah di sisi-Nya. Amin.

Makassar, Agustus 2015

Penulis,



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Peran Pemerintah Daerah.....	12
B. Pengelolaan dan Pengembangan Masyarakat Pesisir.....	16
C. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	17
D. Konsep Masyarakat Nelayan.....	23
E. Strategi Pemberdayaan Nelayan	29
F. Kerangka Pikir	40
G. Definisi Operasional.....	42

BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	44
B. Tipe dan Dasar Penelitian	44
C. Populasi dan Sampel	45
D. Jenis Dan Sumber Data	46
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	51
B. Karakteristik Responden	52
C. Narasi Rumusan Isi	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengalaman Bangsa Indonesia di masa lalu dalam membangun wilayah pesisir dan lautan menunjukkan hasil yang kurang optimal dan cenderung menuju ke arah yang tidak berkelanjutan. Masyarakat nelayan sebagai komunitas wilayah pesisir, sering kali tersisih dari pembangunan sebab prioritas kebijakan pemerintah lebih terfokus kepada sektor pertanian atau daratan. Kehidupan nelayan yang masih menggantungkan nasib kepada hasil laut, masih dalam taraf sederhana dengan pola mata pencaharian menggunakan teknologi tradisional. Disamping alat tangkap mereka sudah jauh tertinggal, mereka melaut juga pada area penangkapan yang terbatas di wilayah pesisir. Rendahnya daya jelajah nelayan ini, semakin menambah sulit nelayan memperbaiki kualitas hidupnya. Dibandingkan nelayan di negara tetangga seperti Malaysia, Jepang dan lainnya, nelayan Indonesia umumnya memanfaatkan hasil laut adalah untuk bertahan hidup.

Kondisi masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir merupakan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara ekonomi, sosial (khususnya dalam hal akses pendidikan dan layanan kesehatan), dan kultural dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Kondisi masyarakat pesisir atau masyarakat nelayan di berbagai kawasan pada umumnya ditandai oleh adanya beberapa ciri, seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial-budaya, rendahnya sumber daya manusia (SDM) karena sebagian besar penduduknya hanya lulus sekolah dasar

atau belum tamat sekolah dasar, dan lemahnya fungsi dari keberadaan Kelompok Usaha Bersama (KUB), Lembaga Keuangan Mikro (LKM), atau kapasitas berorganisasi masyarakat.

Melihat banyaknya masyarakat yang berprofesi nelayan khususnya pada Pulau Barrang Lompo Makassar, dipandang “perlunya kebijakan-kebijakan pembangunan khususnya pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat nelayan (Kusnadi, 2003:10)”. Selanjutnya Kusnadi juga menjelaskan tujuan dari pemberdayaan ini dapat membantu meningkatkan pendapatan nelayan, distribusi pendapatan relatif merata dan kedepannya mobilitas vertikal nelayan dapat diraih secara bertahap. Proses pemberdayaan ini menganggap nelayan sebagai pelaku utama yang menentukan tujuan, mengontrol sumberdaya dan mengarahkan proses yang mempengaruhi hidupnya. Pemanfaatan elemen modal sosial merupakan prasyarat dalam upaya pemberdayaan komunitas, khususnya komunitas nelayan.

Sejalan dengan pendapat diatas, konteks seperti pemberdayaan komunitas nelayan, khususnya komunitas nelayan miskin menjadi penting dalam upaya penyadaran dan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka. Stewart dalam Badaruddin (2005:25) mengemukakan, pemberdayaan merupakan gerak *cultural* (budaya) melalui penyadaran akan kesejahteraannya. Selanjutnya Stewart menjelaskan individu bukanlah objek, melainkan berperan sebagai pelaku yang menentukan tujuan, mengontrol sumberdaya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi hidupnya”. Pemanfaatan elemen modal sosial merupakan prasyarat dalam upaya pemberdayaan komunitas, khususnya komunitas nelayan.

Kemiskinan yang terjadi di lingkungan masyarakat pesisir, khususnya di kalangan nelayan tradisional, hal ini merupakan salah satu masalah serius yang harus menjadi perhatian dan tanggungjawab pemerintah pusat maupun daerah, tidak terkecuali di Pulau Barrang Lompo. Ketika situasi krisis ekonomi merambah ke berbagai wilayah dan harga solar naik, tidak sedikit masyarakat di daerah pesisir yang terancam kolaps karena tidak kuat menanggung tekanan kebutuhan hidup dan kenaikan biaya produksi.

Peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) Sedunia Tahun 2014 yang diperingati di Indonesia setiap tahunnya pada 5 Juni, Kementerian Lingkungan Hidup RI bekerjasama dengan Antheus menyelenggarakan “Pekan Lingkungan Indonesia (PLI) ke-18 Tahun 2014”. Kegiatan PLI 2014 ini akan diselenggarakan pada 29 Mei – 1 Juni 2014 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta dan diikuti oleh Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Swasta Nasional dan Multinasional, Badan dan Organisasi Lingkungan Hidup serta Pemerhati Lingkungan. Selain pameran juga akan diisi dengan berbagai kegiatan seminar, workshop, dan lomba.

Tahun ini Indonesia mengusung tema “*Satukan Langkah, Lindungi Ekosistem Pesisir dari Dampak Perubahan Iklim*” yang dimaksudkan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat atas pentingnya perlindungan ekosistem pesisir dan dampak perubahan iklim dalam rangka ketahanan lingkungan. Tema HLH 2014 ini selaras dengan tema *World Environment Day 2014* yang dikeluarkan oleh *United Nations Environment Programme (UNEP)* yaitu “*Raise Your Voice, Not the Sea Level*”. <http://www.menlh.go.id/peluncuran->

[pli-tahun-2014-%E2%80%9Csatukan-langkah-lindungi-ekosistem-pesisir-dari-dampak-perubahan-iklim%E2%80%9D/](#)

Masyarakat nelayan dapat di pandang sebagai suatu lingkungan hidup dari satu individu atau satu keluarga nelayan. Dengan kata lain masyarakat nelayan dibentuk oleh sejumlah rumah tangga nelayan dan tiap rumah tangga merupakan lingkungan hidup bagi yang lainnya (Mantjoro, 1995: 24). Kehidupan masyarakat nelayan adalah keadaan nyata yang dapat diungkapkan melalui usaha mereka yang dipengaruhi oleh musim penangkapan ikan, kondisi alam tidak menunjang, terbatasnya modal dan tingkat pendidikan yang rendah sehingga mengakibatkan keadaan sosial ekonomi lemah. Nelayan di Pulau Barrang Lompo kebanyakan masih menggunakan alat tangkap soma dampar sebagai alat tangkap utama yang dilakukan secara turun temurun. Sebenarnya mereka ingin mencoba alat tangkap lain yang lebih modern dan efisien tapi karena keterbatasan modal yang dimiliki maka mereka hanya dapat bertahan dengan alat tangkap yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan umum pulau Barrang Lompo dan mempelajari aspek sosial dan aspek ekonomi dalam kehidupan masyarakat nelayan yang ada, seperti pendidikan, ukuran keluarga, perumahan, modal usaha, sistem bagi hasil dan pendapatan.

Berbagai studi telah banyak membuktikan bahwa kehidupan masyarakat pesisir, khususnya keluarga nelayan tidak pernah lepas dari masalah kemiskinan dan kesenjangan sosialekonomi. Dibandingkan dengan kelompok masyarakat miskin lain di desa pertanian atau perkampungan-perkampungan kumuh (*slum*) di daerah perkotaan, tekanan yang dialami keluarga nelayan miskin, buruh nelayan,

nelayan kecil, atau nelayan tradisional relatif lebih mendalam. Menurut Khudori (2009:45), beberapa faktor yang menjadi penyebab meluasnya tekanan kemiskinan yang dialami masyarakat nelayan adalah:

1. Kuatnya tekanan-tekanan struktural yang bersumber dari kebijakan pemerintah dalam membangun sub-sektor perikanan. Tinjabate (dalam: Khudori, 2009:45) membuktikan, akibat kebijakan pembangunan perikanan yang cenderung hanya mengedepankan untuk peningkatan hasil produksi perikanan laut sebagai sumber devisa negara, intervensi birokrasi dan kapitalisasi dalam kegiatan nelayan di Pulau Barrang Lompo, Sulawesi Selatan menjadi intensif, namun justru memarginalisasi kelompok nelayan miskin atau nelayan tradisional. Kepentingan nelayan tradisional menjadi terabaikan akibat perlakuan diskriminatif Pemda yang lebih mementingkan nelayan modern.
2. Ketergantungan yang berbentuk hubungan patron-klien antara pemilik faktor produksi (kapal dan alat tangkap) dan buruh nelayan. Sejumlah penelitian memperlihatkan, bahwa akibat penetrasi kapitalisme dalam aktivitas nelayan, nelayan dan buruh nelayan lebih cepat terseret ke dalam kemiskinan. Penggunaan teknologi penangkapan ikan yang diharapkan mengubah *mode of production* dari sistem tradisional jadi modern tidak terjadi. Hal ini karena proses yang terjadi tidak dibarengi pergeseran hubungan kerja ke arah yang lebih rasional dan saling menguntungkan.
3. Adanya fenomena kompradorisme dalam modernisasi alat tangkap nelayan. Ini ditandai dengan fragmentasi kegiatan nelayan dari homogen jadi beragam akibat intervensi kapital atas komunitas nelayan. Hal ini memunculkan

formasi sosial baru, yaitu adanya buruh nelayan dan punggawa, serta perubahan sumber penghasilan nelayan yang semula diusahakan sendiri kemudian jadi upah yang diberikan juragan pemilik faktor produksi.

Berbeda dengan nelayan modern yang acapkali mampu merespon perubahan dan lebih kenyal dalam menyasati tekanan perubahan dan kondisi *over fishing*, nelayan tradisional seringkali memang mengalami proses marginalisasi dan menjadi korban dari program pembangunan dan modernisasi perikanan yang sifatnya a-historis. Akibat keterbatasan teknologi yang dimiliki, ruang gerak nelayan tradisional umumnya sangat terbatas: mereka hanya mampu beroperasi di perairan pantai (*inshore*). Kegiatan penangkapan ikan dilakukan dalam satu hari sekali melaut (*one day a fishing trip*) (Kusnadi 2003:86). Beberapa contoh nelayan yang termasuk tradisional adalah nelayan *jukung*, nelayan pancingan, nelayan udang, dan nelayan teri nasi.

Selain itu, beberapa faktor internal dan eksternal yang menyebabkan kemiskinan nelayan. Faktor internal yang menyebabkan kemiskinan nelayan adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi internal sumberdaya manusia nelayan dan aktifitas kerja mereka. yang termasuk kedalam faktor internal ini adalah:

- (1) keterbatasan kualitas sumberdaya manusia nelayan,
- (2) keterbatasan modal usaha dan teknologi,
- (3) hubungan kerja (pemilik perahu-nelayan buruh) dalam organisasi penangkapan yang dianggap kurang menguntungkan nelayan buruh,
- (4) kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan,

- (5) ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut, dan
- (6) gaya hidup yang dipandang “boros” sehingga kurang berorientasi kemasa depan.

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi diluar diri dan aktifitas kerja nelayan. Dan yang termasuk kedalam faktor ini adalah:

- (1) Kebijakan pembangunan perikanan yang lebih berorientasi pada produktifitas untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional, parsial dan tidak memihak nelayan tradisional,
- (2) Sistem pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagangperantara,
- (3) Kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran dari wilayah darat, praktek penangkapan dengan bahan kimia, perusakan terumbu karang, dan konvensi hutan bakau di kawasan pesisir,
- (4) Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan,
- (5) Penegakan hukum yang lemah terhadap perusak lingkungan,
- (6) Terbatasnya teknologi pengolahan hasil tangkap pasca tangkap,
- (7) Terbatasnya peluang-peluang kerja di sektor non perikanan yang tersedia di desa-desa nelayan,
- (8) Kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun, dan
- (9) Isolasi geografis desa nelayan yang mengganggu mobilitas barang, jasa, modal dan manusia (kusradi,2003).

Pasca diberlakukannya kebijakan kenaikan harga BBM tahun 2013, nelayan tradisional boleh dikatakan adalah kelompok masyarakat pesisir yang paling menderita dan merupakan korban pertama dari perubahan situasi sosial-ekonomi yang terkesan tiba-tiba, namun berkepanjangan. Bisa dibayangkan, apa yang dapat dilakukan nelayan tradisional untuk bertahan dan melangsungkan kehidupannya, jika dari hari ke hari potensi ikan di laut makin langka karena cara penangkapan yang berlebihan? Dengan hanya mengandalkan pada perahu tradisional dan alat tangkap ikan yang sederhana, jelas para nelayan tradisional ini tidak akan pernah mampu bersaing dengan nelayan modern yang didukung perangkat yang serba canggih dan kapal besar yang memiliki daya jangkauan yang jauh lebih luas.

Bagi nelayan tradisional, musim kemarau yang panjang bukan saja sama dengan memperlama masa kesulitan mereka dalam memperoleh hasil tangkapan, tetapi juga menyebabkan kehidupan mereka menjadi makin miskin, dan mereka terpaksa masuk dalam perangkap utang yang tidak berkesudahan. Keterbatasan kemampuan nelayan-nelayan tradisional dalam berbagai aspek, khususnya penguasaan alat tangkap yang serba terbatas adalah hambatan potensial bagi mereka untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengatasi kemiskinan yang membelit mereka selama ini (Kusnadi 2003:98). Dalam banyak kasus, nelayan tradisional yang miskin umumnya lebih memilih menerima nasib dan berusaha beradaptasi dengan kondisi kemiskinan yang membelenggunya daripada berusaha menyiasatinya.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu suatu kegiatan yang dibuat oleh Pemerintah dengan harapan kegiatan tersebut baik secara langsung maupun tidak

langsung dapat mempengaruhi masyarakat sasaran sehingga masyarakat secara pro aktif berpartisipasi mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yaitu kegiatan yang indikatornya berupa tersalurnya tenaga kerja, meningkatnya distribusi pendapatan (*income*) bagi masyarakat dan Negara, terciptanya pemerataan pendapatan, sandang dan pangan, kesehatan, hubungan sosial, keamanan dan lainnya.

Berkembangnya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir ada beberapa yang dapat dilakukan yaitu:

1. Penyediaan Informasi potensi ekonomi dan tehnologi
2. Pendidikan dan Latihan untuk meningkatkan keterampilan manajerial
3. Pembangunan/penyediaan infra struktur seperti jalan dan jembatan, transportasi
4. Penyediaan kredit melalui Lembaga Keuangan
5. Penyediaan atau subsidi sarana produksi
6. Penetapan harga minimum

Program pemberdayaan ekonomi rakyat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas pembangunan khususnya di bidang ekonomi. Pemberdayaan ekonomi rakyat dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, memperkuat basisi ekonomi daerah dan pemanfaatan sumberdaya daerah secara efesien dan berkelanjutan. Mendorong usaha kecil, menengah dan koperasi untuk berkembang dan berperan dalam pembangunan ekonomi, serta mampu mendorong berkembangnya ekonomi

daerah dan mampu pula menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha (Fithriyani, 2014)

Sebagai suatu kesatuan sosial, masyarakat nelayan hidup, tumbuh, dan berkembang di wilayah pesisir atau wilayah pantai. Dalam konstruksi sosial masyarakat di kawasan pesisir, masyarakat nelayan merupakan bagian dari konstruksi sosial tersebut, meskipun disadari bahwa tidak semua desa-desa di kawasan pesisir memiliki penduduk yang bermatapencaharian sebagai nelayan. Walaupun demikian, di desa-desa pesisir yang sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai nelayan, petambak, atau pembudidaya perairan, kebudayaan nelayan berpengaruh besar terhadap terbentuknya identitas kebudayaan masyarakat pesisir secara keseluruhan (Ginkel, 2007). Baik nelayan, petambak, maupun pembudidaya perairan merupakan kelompok-kelompok sosial yang langsung berhubungan dengan pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan.

Berdasarkan kondisi di atas, penulis ingin meneliti peran pemerintah dalam pemberdayaan nelayan di pulau Barrang Lompo, Sulawesi Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok sebagai berikut:

Bagaimana peran pemerintah dalam pemberdayaan nelayan di pulau Barrang Lompo.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan dan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui peran pemerintah dalam pemberdayaan nelayan di pulau Barrang Lompo.

D. Kegunaan Penelitian

Yang menjadi kegunaan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Kegunaan teoritis adalah sebagai bahan perbandingan dalam pembelajaran pengetahuan pemberdayaan nelayan.
2. Kegunaan praktis adalah sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam meningkatkan peran pemerintah terhadap kelangsungan hidup nelayan di pesisir pantai khususnya di Pulau Barrang Lompo.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Pemerintah Daerah

Menurut Soerjono Soekanto (2006:243) pengertian peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan.

Perubahan ke 4 (empat) UUD 1945 menyatakan jelas mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi: "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-Undang". Sedang Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa: "pemerintahan daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat".

Definisi Pemerintahan Daerah di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut: "Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan diatas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dimana unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah. Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan.

Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah:

1. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
3. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Banyak program telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan nelayan. Program yang bersifat umum antara lain Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Keluarga Sejahtera, Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Sedangkan

program yang secara khusus ditujukan untuk kelompok sasaran masyarakat nelayan antara lain program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PEMP) dan Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil (PUPTSK).

Namun, secara umum program-program tersebut tidak membuat nasib nelayan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Salah satu penyebab kurang berhasilnya program-program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan nelayan adalah formulasi kebijakan yang bersifat *top down*. Formula yang diberikan cenderung seragam padahal masalah yang dihadapi nelayan sangat beragam dan seringkali sangat spesifik lokal. Di samping itu, upaya penanggulangan kemiskinan nelayan seringkali sangat bersifat teknis perikanan, yakni bagaimana upaya meningkatkan produksi hasil tangkapan, sementara kemiskinan harus dipandang secara holistik karena permasalahan yang dihadapi sesungguhnya jauh lebih kompleks dari itu.

Pertusekali diterbitkan sebuah kebijakan sosial yang berisikan keterpaduan penanganan kemiskinan nelayan sebagaimana yang mereka butuhkan, kebijakan tersebut juga harus didukung oleh kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten atau kota dimana terdapat masyarakat miskin khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan keegoan dari masing-masing pemangku kepentingan. Keterpaduan tersebut adalah sebagai berikut: *pertama*, keterpaduan sektor dalam tanggung jawab dan kebijakan. Keputusan penanganan kemiskinan nelayan harus diambil melalui proses koordinasi di-internal pemerintah, yang perlu digaris bawahi adalah kemiskinan nelayan tidak akan mampu ditangani secara kelembagaan oleh sektor kelautan dan perikanan, melainkan seluruh pihak terkait.

Kedua, keterpaduan keahlian dan pengetahuan, untuk merumuskan berbagai kebijakan, strategi, dan program harus didukung berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan keahlian, tujuannya adalah agar perencanaan yang disusun betul-betul sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat nelayan. *Ketiga*, keterpaduan masalah dan pemecahan masalah sangat diperlukan untuk mengetahui akar permasalahan yang sesungguhnya, sehingga kebijakan yang dibuat bersifat komprehensif, dan tidak parsial. *Keempat*, keterpaduan lokasi, memudahkan dalam melakukan pendampingan, penyuluhan dan pelayanan (lintas sektor), sehingga program tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Kegagalan penanganan kemiskinan nelayan ini selama ini, disamping kurangnya keterpaduan, juga terdapatnya berbagai kelemahan dalam perencanaan. Untuk itu dalam proses perencanaan harus unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perumusan sasaran yang jelas, berupa; hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan yang dibuat, kelembagaan yang bertanggung jawab, serta objek dari kegiatan.
2. Pengidentifikasian situasi yang ada, yaitu dengan mempertimbangkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman), tujuannya untuk mengetahui kondisi sesungguhnya tentang objek yang akan ditangani. Selanjutnya akan memudahkan dalam menyusun berbagai strategi yang mendukung penanganan kemiskinan nelayan.
3. Penentuan tujuan harus bersifat spesifik (objek, kegiatan, dibatasi waktu dan terukur), sehingga pengentasan kemiskinan nelayan jelas siapa sasarannya dan jenis kegiatan yang akan dilakukan, dan selanjutnya berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan dapat ditentukan dengan jelas.

4. Menganalisa keadaan, pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan antara ketentuan yang telah ditetapkan dengan realitas yang ada dilapangan, dan apabila terjadi permasalahan diluar dugaan, maka perlu segera dibuatkan strategi dan tindakan baru untuk menutup jurang perbedaan.
5. Pendampingan, monitoring dan evaluasi, pendampingan harus dilakukan awal kegiatan dilaksanakan, sampai pasca kegiatan, sehingga akan menjadi bahan evaluasi, apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Suyatno, (2004: 189-100) bahwa beberapa faktor yang menyebabkan program-program pemerintah tidak berhasil yaitu:

1. Pendekatan yang dilakukan lebih bersifat struktural dan mengabaikan variabel-variabel kultural yang ada di dalam masyarakat.
2. Ada indikasi kebocoran dana program di tingkat implementasi dan penyaluran dana yang seringkali salah sasaran antara oknum pemerintah dengan konsultan pelaksana program.
3. Program-program yang dijalankan tersebut tidak memiliki jaminan keberlanjutan dan akuntabilitas publik. Program lebih bersifat proyek sehingga memperdulikan keberlangsungan program.
4. Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan tidak mempunyai mekanisme pengawasan dan sanksi yang jelas, sehingga kemungkinan penyelewengan program tersebut besar.

B. Pengelolaan dan Pengembangan Masyarakat Pesisir

Menurut Dahuri (2008: 81) bahwa potensi pembangunan yang terdapat di wilayah pesisir dan lautan secara garis besar terdiri dari tiga kelompok: (1)

sumber daya dapat pulih (*renewable resources*), (2) sumber daya tak dapat pulih (*non-renewable resources*), dan (3) jasa-jasa lingkungan (*emviromental services*).

Kusnadi (2006: 13), salah satu faktor terpenting yang menyebabkan nelayan kurang memperoleh perhatian publik adalah kebijakan pembangunan yang selama ini tidak menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penentu masa depan bangsa. Akibat lebih lanjut adalah masyarakat kurang memiliki sikap simpati dan empati terhadap pergulatan hidup nelayan.

Sifat kebijakan pemerintah dan perhatian masyarakat yang kurang, serta di tengah-tengah berbagai keterbatasan akses sosial, ekonomi, dan politik, telah menjadikan komunitas nelayan mengembangkan mekanisme internal, strategi adaptasi, dan membangun kemampuan diri berdasarkan potensi sumber daya yang tersedia di lingkungannya agar bisa bertahan hidup. Dengan dilandasi oleh nilai-nilai budaya sebagai masyarakat pesisir, nelayan memiliki sikap kemandirian yang tinggi dalam menghadapi gempuran tekanan kehidupan yang datang setiap saat. Karena kapasitas kemandirian ini mereka seperti menjadi “komunitas tanpa negara”, sinis kepada aparaturnya dan berpotensi resisten terhadap kebijakan negara. Sikap-sikap demikian merupakan buah dari ketimpangan relasi antara negara dan masyarakat nelayan yang sudah berlangsung cukup lama (Kusnadi, 2006: 13).

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Pemberdayaan menurut asal katanya *empowering* dari bahasa Inggris *empower* yang artinya “menugaskan atau memberi wewenang”. Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan

dengan konsep mandiri, partisipasi jaringan kerja, dan keadilan dan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Menurut Mc Ardle (dalam Sedarmayanti, 2004:117) yang mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan.

Selanjutnya Shardlow (dalam Adi, 2008:78) melihat bahwa berbagai pengertian yang ada mengenai pemberdayaan, pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.

Menurut Fahrudin (2005: 49-51) bahwa memberdayakan masyarakat merupakan satu masalah tersendiri yang berkaitan dengan hakikat *power* (daya). Pada dasarnya, daya atau *power* tersebut dimiliki oleh setiap individu dan kelompok, akan tetapi kadar dari daya tersebut berbeda satu dengan yang lainnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait antara lain seperti pengetahuan, kemampuan, status, harta, kedudukan dan jenis kelamin. Faktor-faktor yang saling terkait tersebut pada akhirnya membuat hubungan antara individu dengan dikotomi subyek (dalam hal ini pemerintah daerah selaku penguasa) dan obyek (tentunya masyarakat sebagai yang dikuasai). Bentuk relasi sosial yang dicirikan dengan dikotomi subyek (pemerintah) dan obyek

(masyarakat) tersebut merupakan relasi yang ingin “diperbaiki” melalui proses pemberdayaan.

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan;
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan dan;
3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2005).

Pemberdayaan didefinisikan sebagai usaha memberi sebagian daya atau kekuasaan kepada kelompok yang dianggap kurang berdaya. Pemberian daya tersebut diharapkan akan member lebih banyak kesempatan kepada suatu kelompok tertentu untuk berkembang dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam dirinya maupun peluang yang tumbuh diluar kelompok (Hikmat, 2006:75).

Kusnadi (2006: 5-6), proses dan aktivitas pemberdayaan masyarakat pesisir harus didasarkan pada prinsip-prinsip pemikiran yang bisa menjadi landasan filosofi pemberdayaan. Filosofi pemberdayaan masyarakat pesisir dapat dieksplorasi melalui nilai-nilai yang mendasar hakikat hubungan antara (1) manusia dan Allah, (2) manusia dengan manusia, dan (3) manusia dengan alam. Ketiga jenis hakikat hubungan vertikal-horizontal ini melahirkan prinsip-prinsip kehidupan sebagai berikut:

Satu, Tuhan menciptakan jagad raya dengan segala isinya semata-mata untuk kehidupan dan kesejahteraan manusia dunia dan akhirat. Pada akhirnya nanti, amanah ini harus dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh manusia di hadapan Sang Pencipta. Prinsip ini akan mendorong pikiran dan sikap manusia untuk menghormati dan menghargai seluruh ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, khususnya manusia dan sumber daya alam, serta berhati-hati dalam menjalani kehidupan.

Dua, manusia menyadari dan mengakui bahwa sumber daya alam yang ada di lingkungannya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola dengan baik dan bijaksana untuk kesejahteraan sosial dan kelangsungan hidupnya. Prinsip ini melahirkan sikap menjaga kelestarian alam dan memanfaatkannya secara proporsional dengan tetap memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungan.

Tiga, manusia adalah makhluk sosial. Ia tidak dapat mengatasi sendiri seluruh persoalan kehidupannya tanpa bantuan orang lain. Prinsip ini akan melahirkan sikap untuk bekerja sama, kebersamaan, saling membantu atau gotong royong, dan persatuan.

Empat, manusia adalah makhluk berbudaya yang memiliki identitas dan potensi sosial-budaya sebagai basis eksistensinya. Prinsip ini melahirkan sikap menghargai terhadap nilai-nilai budaya, pranata (kelembagaan) sosial, dan pengakuan akan eksistensi suatu masyarakat.

Lima, manusia memiliki kehendak dan hak untuk mencapai kualitas kehidupan yang sempurna lahir-batin. Prinsip ini akan melahirkan sikap apresiatif terhadap etos kerja, kreativitas, dan aspirasi sosial yang berkembang.

Enam, manusia memiliki martabat atau harga diri, otonomi diri dan kewajiban-kewajiban sosial dalam kehidupannya. Prinsip ini melahirkan sikap menghargai kebebasan sosial yang bertanggung jawab dan konstruktif, mengembangkan ruang demokratisasi dan dialogis, serta menghormati keinginan-keinginan dan cita-cita warga masyarakat.

Tujuh, dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat berhak memperoleh perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan dari negara, baik secara sosial, budaya, dan ekonomi maupun politik-kebijakan. Tujuh prinsip dasar pemberdayaan tersebut memiliki sifat universal sehingga daya dukung dan keberterimaan masyarakat di manapun mereka berada cukup besar. Norma-norma keagamaan, adat-istiadat, nilai-nilai tradisi, etika sosial masyarakat, dan tata normatif kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan ranah yang memungkinkan ketujuh prinsip tersebut dapat diterapkan dengan baik dalam proses pemberdayaan masyarakat, khususnya di masyarakat pesisir.

Strategi pemberdayaan masyarakat pesisir dapat ditempuh dengan mengembangkan dua model beserta variasinya. *Pertama*, model pemberdayaan

masyarakat pesisir berbasis *gender*. *Kedua*, model pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis pranata budaya atau kelembagaan sosial. Kedua model ini juga bisa disinergikan. Pilihan terhadap salah satu model tersebut dalam pemberdayaan masyarakat pesisir akan banyak dipengaruhi oleh tujuan pemberdayaan, unsur-unsur yang terlibat, dan kondisi-kondisi lingkungan sekitar.

Setiap kelompok masyarakat, seperti masyarakat pesisir memiliki pranata budaya atau kelembagaan sosial yang fungsional dalam mengawal kehidupan mereka. Pranata atau kelembagaan sosial budaya tersebut di antaranya adalah pranata penangkapan di perahu, kelompok arisan, kelompok simpan-pinjam, dan kelompok pengajian rutin. Eksistensi pranata atau kelembagaan awal yang baik kalau memenuhi syarat: jelas keanggotaan dan kepengurusannya, terikat oleh tujuan bersama dan norma-norma kolektif yang mengatur hak-kewajiban anggota, melakukan pertemuan rutin, ada kegiatan bersama, kohesivitas anggota solid, dan memiliki kemampuan bekerja sama. Melalui kelembagaan ini terbentuk kelompok-kelompok sosial yang berfungsi sebagai basis dan subjek pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat pesisir yang berbasis kelembagaan akan berfungsi optimal untuk pengorganisasian warga dan pengelolaan kemampuan sumber daya sosial-ekonomi lokal, serta memanfaatkannya secara efektif dan efisien sehingga mempermudah masyarakat pesisir dituntut untuk mengidentifikasi secara cermat eksistensi pranata atau kelembagaan sosial budaya lokal yang benar-benar berperan dalam kehidupan masyarakat pesisir.

Memperhatikan berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir, kebijakan pemberdayaan yang dilakukan

terhadap mereka tetap penting dan relevan untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa. Walaupun masih terjadi distorsi dalam proses demokratisasi politik yang berpengaruh terhadap upaya meningkatkan partisipasi masyarakat yang lebih baik, era otonomi daerah memberikan ruang dan peluang yang cukup luas bagi kemudahan mewujudkan tujuan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Karena itu, masyarakat pesisir harus didorong untuk memiliki kemampuan yang lebih besar dalam memberdayakan dirinya secara berkelanjutan. Dalam hal ini, filosofi dan strategi pemberdayaan yang mendasarinya harus berakar kuat pada pandangan hidup, sistem nilai lokal, adat-istiadat, pranata sosial budaya, atau kebudayaan setempat. Dalam proses dan aktivitas pemberdayaan, negara dan seluruh komponen *stakeholders* memiliki tanggung jawab kolektif-sinergis untuk mendukung pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat pesisir.

D. Konsep Masyarakat Nelayan

Status penguasaan kapital, nelayan dapat dibagi menjadi nelayan tradisional dan nelayan buruh. Nelayan tradisional secara umum merupakan kelompok sosial yang paling terpuruk tingkat kesejahteraannya, sementara kondisi ini sangat dekat dengan tekanan ekonomi, pendapatan yang tidak menentu sehingga menyebabkan rendahnya perolehan rumah tangga dari aktivitas sebagai nelayan. Hal ini dapat disebabkan faktor-faktor baik positif maupun negatif.

1. Masyarakat Nelayan

Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Kawasan laut Nusantara begitu luasnya dan di dalamnya terkandung beragam potensi sumberdaya, di

antaranya perikanan. Semua itu akan menjadi sumber penghidupan masa depan bila dimanfaatkan secara optimal dan dijaga kelestariannya. Masyarakat nelayan yang hidup dan berusaha di lautan Nusantara merupakan bagian integral yang harus ikut serta di dalamnya, terutama dalam penyertaan mengisi kepentingan rakyat ini sampai kapanpun. Nelayan kadangkala diposisikan hanya sebagai pekerja di laut telah diopinionkan tidak memiliki kemampuan yang signifikan dalam mengisi pemberdayaan bangsa, berbagai keraguan tentang keahlian nelayan yang sesungguhnya tidak dimiliki oleh masyarakat lain. Padahal keahlian spesifik dari nelayan ini merupakan keunggulan kooperatif yang dimiliki bangsa ini. Oleh karena itu, nelayan sebenarnya merupakan pemicu utama keberhasilan pembangunan kelautan.

Nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut. Di Indonesia para nelayan biasanya bermukim di daerah pinggir pantai atau pesisir laut. Komunitas nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal didesa-desa atau pesisir (Sastrawidjaya, 2002). Ciri komunitas nelayan dapat dilihat dari berbagai segi. Sebagai berikut:

- a. Dari segi mata pencaharian. Nelayan adalah mereka yang segala aktivitasnya berkaitan dengan lingkungan laut dan pesisir. Atau mereka yang menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian mereka.
- b. Dari segi cara hidup. Komunitas nelayan adalah komunitas gotong royong. Kebutuhan gotong royong dan tolong menolong terasa sangat penting pada saat untuk mengatasi keadaan yang menuntut pengeluaran biaya besar dan pengerahan tenaga yang banyak. Seperti saat berlayar. Membangun rumah atau tanggul penahan gelombang di sekitar desa.

Mubyarto dalam Rahardjo (2002), memberikan pengertian berbeda tentang masyarakat nelayan. Menurutnya, masyarakat desa nelayan dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu di satu pihak adalah kelompok kaya dan kaya sekali, dan kelompok ekonomi sedang, miskin, miskin sekali dan tukang dilain pihak. Pemakaian kata desa nelayan telah mengantarkan kepada pemahaman bahwa nelayan dapat dilihat sebagai masyarakat yang mempunyai ciri-ciri sendiri dan bertempat tinggal di wilayah tepi pantai, sehingga dapat juga disebut sebagai masyarakat yang berdiam di desa pantai perkampungan nelayan, yang menjadikan perikanan sebagai mata pencahariannya yang terpenting. Keluarga sebagai inti terkecil dalam masyarakat telah dijadikan sebagai pusat penggalan informasi tentang kehidupan nelayan.

2. Kemiskinan Nelayan

Merupakan suatu ironi bagi sebuah negara maritim seperti Indonesia bahwa masyarakat nelayan merupakan golongan masyarakat yang paling miskin. Walau data agragatif dan kuantitatif yang terpercaya tidak mudah diperoleh, pengamatan visual/langsung ke kampung-kampung nelayan dapat memberikan gambaran yang jauh lebih gamblang tentang kemiskinan nelayan di tengah kekayaan laut yang begitu besar.

Pemandangan yang sering dijumpai di perkampungan nelayan adalah lingkungan hidup yang kumuh serta rumah-rumah yang sangat sederhana. Kalaupun ada beberapa rumah yang menonjolkan tanda-tanda kemakmuran (misalnya rumah yang megah dan berantena parabola), rumah-rumah tersebut umumnya dipunyai oleh pemilik kapal, pemodal, atau rentenir yang jumlahnya

tidak signifikan dan sumbangannya kepada kesejahteraan komunitas sangat bergantung pada individu yang bersangkutan. Sehingga lokasi geografisnya yang banyak berada di muara sungai, lingkungan nelayan sering kali juga sudah sangat terpolusi. Lebih dari itu, aspirasi politisnya pun acap kali terabaikan.

Kondisi yang secara multidimensi demikian miskin, akan sangat sulit bagi para nelayan untuk keluar dari lingkungan kemiskinan dan begitu saja bersaing dalam pemanfaatan hasil laut di era keterbukaan sekarang ini. Mereka akan selalu kalah bersaing dengan perusahaan penangkapan ikan, baik asing maupun nasional, yang berperlengkapan maritim. Oleh karena itu, pemberdayaan komunitas nelayan merupakan langkah yang sangat krusial dalam mencapai tujuan pemanfaatan kekayaan laut Indonesia.

Kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal kehidupan sehari-hari sangat terbatas. Bagi masyarakat nelayan, di antara beberapa jenis kebutuhan pokok kehidupan, kebutuhan yang paling penting adalah pangan. Adanya jaminan pemenuhan kebutuhan pangan setiap hari sangat berperan besar untuk menjaga kelangsungan hidup mereka (Kusnadi, 2006).

Faktor-faktor yang paling mendasar sebagai indikator dari kemiskinan nelayan, yaitu:

- a. Keterbatasan modal untuk mengembangkan usaha. Hal ini disebabkan oleh tanggungan keluarga yang tinggi. Selain biaya kehidupan nelayan yang banyak hal ini diperburuk lagi dengan jumlah anak yang mereka miliki. Selain itu sumber pendapatan diperoleh dari satu orang.
- b. Tingkat pendidikan rendah. Tingkat pendidikan sumberdaya manusia yang rendah merupakan salah satu permasalahan yang juga dapat menyebabkan

nilai tambah mengapa nelayan miskin. Biaya pendidikan yang tinggi, lokasi sekolah yang jauh dari tempat tinggal merupakan alasan bagi nelayan untuk memilih tidak bersekolah. Selain itu, nelayan merasa tidak memerlukan pendidikan formal karena sebagian besar waktunya lebih banyak dihabiskan di laut.

- c. Pendapatan yang rendah. Pendapatan nelayan produsen sebagai pelaku utama sudah selayaknya jika barang yang sulit didapat dan besar permintaan maka tinggi harganya. Namun fakta menunjukkan bahwa nelayan termasuk kelompok miskin di semua negara. Bahkan atribut bagi mereka adalah termiskin di antara yang miskin "*the poorest of the poor*". Kemiskinan itu terjadi karena nilai tukar nelayan yang rendah yang disebabkan komoditas yang mereka hasilkan dibayar murah (Nikijuluw, 2002).

Faktor-faktor yang menyebabkan pendapatan nelayan rendah antara lain adalah unit penangkapan yang terbatas yang dikarenakan penguasaan teknologi yang rendah, skala usaha/modal yang dimiliki kecil dan masih bersifat tradisional, kemampuan nelayan dalam memanfaatkan peluang usaha dan mengatasi tantangan lingkungan yang rendah dikarenakan masyarakat yang masih bergantung pada musim penangkapan. Faktor lainnya adalah *law enforcement* yang tidak berpihak kepada nelayan, di antaranya terjadinya ego sektoral, regulasi yang tidak mendukung, terbatasnya peran kelembagaan baik pemerintah maupun non pemerintah, penetapan bahan baku (ikan) yang kurang adil, belum diterapkannya undang-undang anti monopoli, pembagian keuntungan yang tidak proporsional dan kebijakan ekonomi secara mikro yang

lebih banyak memberikan kerugian di pihak nelayan dibandingkan memberikan keuntungan.

Faktor lain yang menyebabkan pendapatan nelayan rendah adalah harga jual ikan yang juga rendah. Penetapan harga dasar ikan, nelayan atau pengusaha perikanan memiliki insentif untuk berusaha. Respon nelayan terhadap tingginya nilai jual ikan dapat meningkatkan upaya penangkapan atau melakukan investasi tambahan untuk memperbesar armada kapal atau unit penangkapan.

- d. Perilaku ekonomi rumah tangga nelayan. Beberapa alasan yang menjadikan perilaku ekonomi nelayan yang buruk adalah budaya boros, dimana pendapatan hari ini dihabiskan pada hari yang sama pula tidak ada kesadaran untuk memiliki tabungan, dan pola konsumsi yang cenderung tidak teratur.
- e. Tidak ada alternatif *livelihood*, dengan segala bentuk keterbatasannya sehingga nelayan tidak mampu memiliki mata pencaharian lain, keterbatasan tersebut antar alain tidak memiliki peluang kerja bagi mereka dan kemampuan melihat peluang kerja yang rendah, dan
- f. Perencanaan secara regional yang tidak mendukung, dalam menetapkan kebijakannya pemerintah hampir tidak memperhatikan adanya perbedaan mendasar secara demografi dan geografi, sehingga kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik pada daerah-daerah tertentu. Selain itu, instansi terkait yang telah ditunjuk selaku pembina terlihat tidak serius dalam menangani hal ini, berbagai kebijakan mengenai pengelolaan hasil laut tidak disosialisasikan ke masyarakat nelayan serta tidak adanya pembinaan mengenai teknologi manajemen industri.

Berdasarkan faktor-faktor penyebab mengapa nelayan miskin walaupun mereka merupakan aktor utama dalam operasional yang diuraikan dengan menggunakan *problem tree analysis* dapat diketahui bahwa persoalan yang dihadapi bersifat kompleks selain disebabkan oleh sifat ikan yang cepat membusuk, produksi yang berfluktuasi, akses terhadap modal masih kurang, penanganan pasca panen belum sempurna, teknologi masih sederhana, lokasi terpencar, dan tingkat pendidikan nelayan yang rendah serta adanya kualitas produk yang dihasilkan rendah dengan demikian harga jual produk juga menjadi rendah.

E. Strategi Pemberdayaan Nelayan

Beberapa pendekatan dan strategi dalam pemberdayaan masyarakat (Karsidi, 2001) menuju kemandirian petani dan nelayan kecil, dapat ditempuh dengan berbagai upaya sebagai berikut:

1. Memulai dengan tindakan mikro dan lokal. Proses pembelajaran rakyat harus dimulai dengan tindakan mikro dan lokal, namun memiliki konteks makro dan global. Dialog mikro-makro harus terus menerus menjadi bagian pembelajaran masyarakat agar berbagai pengalaman mikro dapat menjadi *policyinput* dan *policyreform* sehingga memiliki dampak yang lebih luas. Petugas pemberdayaan/pendamping masyarakat tani dan nelayan kecil seyogyanya diberikan kebebasan untuk mengembangkan pendekatan dan cara yang sesuai dengan rumusan tuntutan kebutuhan setempat/lokal di wilayah tugasnya masing-masing.

2. Pengembangan sektor ekonomi strategis sesuai dengan kondisi lokal (daerah).
Karena masing-masing daerah potensinya berbeda, maka kebijakan yang akan diberlakukan juga berbeda antar daerah. Pemberlakuan kebijakan secara seragam untuk semua daerah harus ditinggalkan.
3. Mengganti pendekatan kewilayahan administratif dengan pendekatan kawasan. Pemberdayaan masyarakat tidak mungkin didasarkan atas kewilayahan administratif. Pendekatan kewilayahan administratif adalah pendekatan birokrasi/kekuasaan. Pendekatan kawasan berarti lebih menekankan pada kesamaan dan perbedaan potensi yang dimiliki oleh suatu kawasan tertentu. Dengan pendekatan ini akan memungkinkan terjadinya pemberdayaan masyarakat dalam skala besar dan lebih lanjut akan memungkinkan terjadinya kerjasama antar kawasan yang lebih produktif.
4. Membangun kembali kelembagaan masyarakat. Peranserta masyarakat menjadi keniscayaan bagi semua upaya pemberdayaan masyarakat, jika tidak dibarengi munculnya kelembagaan sosial, ekonomi dan budaya yang benar-benar diciptakan oleh masyarakat sendiri. Misalnya lumbung desa dan organisasi lokal lainnya dipersilahkan tetap hidup.
5. Mengembangkan penguasaan pengetahuan teknis. Perlu dipahami bersama bahwa desakan modernisasi telah menggeser ilmu pengetahuan dan teknologi lokal dan menciptakan ketergantungan masyarakat lokal pada input luar serta hilangnya kepercayaan diri yang sangat serius. Temuan-temuan lokal oleh petani dan nelayan setempat harus mendapatkan pengakuan sejajar dan dipersilahkan bebas berkompetisi dengan inovasi baru dari luar. Pola

penyuluhan yang bersifat sentralistik, topdown dan linier (Sumardjo, 1998) perlu diubah menjadi pendekatan yang lebih dialogis dan hadap masalah.

6. Pengembangan kesadaran pelaku ekonomi. Karena peristiwa ekonomi juga merupakan peristiwa politik atau lebih dikenal dengan politik ekonomi, maka tindakan yang hanya berorientasi memberikan bantuan teknis jelas tidak memadai. Pemberdayaan yang diperlukan adalah tindakan berbasis pada kesadaran masyarakat untuk membebaskan diri dari belenggu kekuatan ekonomi dan politik yang menghambat proses demokratisasi ekonomi. Komitmen para petugas pemberdayaan masyarakat dan lembaga-lembaga terkait pada pengembangan kemandirian petani dan nelayan kecil merupakan sesuatu yang sangat diperlukan.
7. Membangun jaringan ekonomi strategis. Jaringan strategis akan berfungsi untuk mengembangkan kerjasama dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki kelompok ekonomi satu dengan lainnya baik dalam bidang produksi, pemasaran, teknologi dan permodalan. Salah satu yang sudah waktunya dibangun adalah jaringan infrastruktur telekomunikasi dan sistim informasi pendukungnya yang memanfaatkan seperti internet untuk membuka pintu gerbang seluas-luasnya bagi petani dan nelayan atas informasi yang diperlukan bagi pengembangan usahanya (setidaknya melalui mediasi para petugas penyuluh/pendamping pemberdayaan masyarakat).
8. Kontrol kebijakan. Agar kebijakan pemerintah benar-benar mendukung upaya pemberdayaan masyarakat, maka kekuasaan pemerintah harus dikontrol. Sebagai contoh adalah keikutsertaan organisasi petani dan nelayan dalam proses pengambilan keputusan tentang kebijakan pertanian dan perikanan.

Memperhatikan arah tantangan pertanian dan perikanan yaitu seharusnya dikembangkan ke arah agribisnis, maka perlu mendapat penekanan bahwa sasaran strategis pemberdayaan masyarakat bukanlah sekedar peningkatan pendapatan semata, melainkan juga sebagai upaya membangun basis-basis ekonomi yang bertumpu pada kebutuhan masyarakat dan sumberdaya lokal yang handal. Dalam kerangka tersebut, keberhasilan upaya pemberdayaan masyarakat tidak hanya dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan masyarakat melainkan juga aspek-aspek penting dan mendasar lainnya.

Titik pusat perhatian adalah pada pendekatan ke arah pembangunan yang lebih berpihak kepada rakyat. Ada alasan untuk yakin bahwa paradigma seperti itu dewasa ini sedang muncul dari proses penemuan sosial kolektif sedunia. Logika paradigma ini yang menonjol adalah logika lingkungan hidup manusia yang berimbang, sumber dayanya yang dominan adalah sumber daya informasi dan prakarsa yang kreatif yang tak kunjung habis, dan sasarannya yang dominan adalah pertumbuhan umat manusia yang dirumuskan dalam rangka lebih terealisasinya potensi umat manusia. Individu bukanlah sebagai obyek, melainkan berperan sebagai pelaku, yang menentukan tujuan, mengontrol sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi hidupnya sendiri. Pembangunan yang memihak rakyat menekankan nilai pentingnya prakarsa dan perbedaan lokal. Karenanya pembangunan seperti itu mementingkan sistem swa-organisasi yang dikembangkan di sekitar satuan-satuan organisasi berskala manusia dan masyarakat yang berswadaya.

Kesejahteraan dan realisasi diri manusia merupakan jantung konsep pembangunan yang memihak rakyat. Perasaan berharga diri yang diturunkan dari keikutsertaan dalam kegiatan produksi adalah sama pentingnya bagi pencapaian mutu hidup yang tinggi dengan keikutsertaan dalam konsumsi produk-produknya. Keefisienan sistem produksi, karenanya haruslah tidak semata-mata dinilai berdasar produk-produknya, melainkan juga berdasar mutu kerja sebagai sumber penghidupan yang disediakan bagi para pesertanya, dan berdasar kemampuannya menyertakan segenap anggota masyarakat.

Perbedaan paradigma pembangunan yang mementingkan produksi yang dewasa ini unggul dan pembangunan yang lebih berpihak kepada rakyat sebagaiandingannya, mengandung arti penting bagi penciptaan masa depan yang lebih manusiawi. Khususnya pemahaman akan perbedaan itu penting artinya bagi pemilihan teknik sosial termasuk bagaimana pemberdayaan masyarakat dilakukan secara tepat untuk mencapai tujuan-tujuan yang mementingkan rakyat. Penyadaran diri (*conscienzazione*), satu di antara argumen-argumen yang paling telak dan tajam diajukan oleh Paulo Freire (1984), adalah merupakan inti dari usaha bagaimana bisa mengangkat rakyat dari kelemahannya selama ini. Kesempitan pandangan dan cakrawala rakyat yang tersekap dalam kemiskinan dan sering menghayati kehidupan mereka dalam keterpencilan (isolasi) dan kekumuhan, harus diubah kearah suatu keinsyafan, perasaan, pemikiran, gagasan, bahwa hal-ihwal dapat menjadi lain, dan tersedia alternatif-alternatif.

Peran petugas pemberdayaan masyarakat sebagai *outsider people* dapat dibedakan menjadi 3 bagian yaitu peran konsultan, peran pembimbingan dan

peran penyampai informasi. Dengan demikian peranserta kelompok sasaran (masyarakat itu sendiri) menjadi sangat dominan. Belajar dari pengalaman menunjukkan bahwa ketika peran penguasa sangat dominan dan peranserta masyarakat di pandang sebagai kewajiban, maka masyarakat justru terpinggirkan dari proses pembangunan.

Penguatan peranserta masyarakat haruslah menjadi bagian dari agenda demokratisasi lebih-lebih dalam era globalisasi. Peranserta masyarakat harus lebih dimaknai sebagai hak katibang kewajiban. Kontrol rakyat terhadap isi dan prioritas agenda pengambilan keputusan atas program-program pembangunan yang ditujukan kepadanya adalah hak masyarakat sebagai pemegang kata akhir dan mengontrol apa saja yang masuk dalam agenda dan urutan prioritas. Apabila peranserta masyarakat meningkat efektivitasnya, maka sebenarnya upaya pemberdayaan masyarakat telah dijalankan.

Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi dan produktifitas melalui pengembangan sumberdaya manusia, penguasaan teknologi dan penguatan kelembagaan serta perbaikan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial. Upaya ini memerlukan adanya kerjasama yang sinergis dari berbagai kekuatan pembangunan yang ada.

Pemberdayaan masyarakat secara umum dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar pendampingan masyarakat, sebagai berikut:

1. Belajar dari Masyarakat

Prinsip yang paling mendasar adalah prinsip bahwa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini berarti, dibangun pada pengakuan serta kepercayaan akan nilai dan relevansi

pengetahuan tradisional masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah-masalahnya sendiri.

2. Pendamping sebagai Fasilitator.

Masyarakat sebagai Pelaku Konsekuensi dari prinsip pertama adalah perlunya pendamping menyadari perannya sebagai fasilitator dan bukannya sebagai pelaku atau guru. Untuk itu perlu sikap rendah hati serta ketersediaan untuk belajar dari masyarakat dan menempatkan warga masyarakat sebagai narasumber utama dalam memahami keadaan masyarakat itu. Bahkan dalam penerapannya masyarakat dibiarkan mendominasi kegiatan. Kalaupun pada awalnya peran pendamping lebih besar, harus diusahakan agar secara bertahap peran itu bisa berkurang dengan mengalihkan prakarsa kegiatan-kegiatan pada warga masyarakat itu sendiri.

3. Saling Belajar.

Saling Berbagi Pengalaman Salah satu prinsip dasar pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat adalah pengakuan akan pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat. Hal ini bukanlah berarti bahwa masyarakat selamanya benar dan harus dibiarkan tidak berubah. Kenyataan objektif telah membuktikan bahwa dalam banyak hal perkembangan pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat tidak sempat mengejar perubahan-perubahan yang terjadi dan tidak lagi dapat memecahkan masalah-masalah yang berkembang. Namun sebaliknya, telah terbukti pula bahwa pengetahuan modern dan inovasi dari luar yang diperkenalkan oleh orang luar tidak juga memecahkan masalah mereka. Bahkan dalam banyak hal, malah menciptakan masalah yang lebih besar lagi. Karenanya pengetahuan

masyarakat dan pengetahuan dari luar atau inovasi, harus dipilih secara arif dan atau saling melengkapi satu sama lainnya.

Konsep pemberdayaan masyarakat secara mendasar berarti menempatkan masyarakat beserta institusi-institusinya sebagai kekuatan dasar bagi pengembangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Menghidupkan kembali berbagai pranata ekonomi masyarakat untuk dihimpun dan diperkuat sehingga dapat berperan sebagai lokomotif bagi kemajuan ekonomi merupakan keharusan untuk dilakukan. Ekonomi rakyat akan terbangun bila hubungan sinergis dari berbagai pranata sosial dan ekonomi yang ada didalam masyarakat dikembangkan kearah terbentuknya jaringan ekonomi rakyat. Petani saat ini berpikir seolah-olah jalan yang harus dilewati memang seperti ini. Petani berpikir seolah-olah inilah garis takdir yang harus dijalani. Wajar jika petani pada umumnya berpikir seperti itu. Sebab petani sejak awal dikondisikan secara sistematis untuk tidak memiliki pilihan lain kecuali menerapkan pertanian berbasis bahan kimia. Ketika ketergantungan petani terhadap sistem pertanian berbasis bahan kimia sudah menjadi mutlak seperti sekarang ini, petani kita bagaikan orang yang lumpuh dan tidak berdaya.

Maka untuk bisa bangkit dan berdaya, petani harus berani menyadari bahwa dirinya selama ini dikondisikan untuk menjadi obyek yang bergantung dan dihisap oleh pihak dan kekuatan lain, yakni pemodal yang menguasai industri perbenihan, pupuk dan obat-obatan pertanian. Kesadaran ini diharapkan akan mendorong kaum tani untuk menyadri pentingnya membangun kemandirian kaum tani. Dan salah satu pilar yang menopang kemandirian petani adalah penguasaan dalam

teknologi pertanian. Petani harus menguasai teknologi bagi pertanian yang dikerjakannya.

Petani harus bisa membuat benih sendiri. Petani harus bisa membuat pupuk dan obat-obatan sendiri yang cocok dengan kebutuhan pertanian yang berkelanjutan. Oleh karena itu sistem pertanian organik yang berbasis pada sumber daya (lokal) petani adalah jawaban yang relevan. Maka, untuk mengatasi ketergantungan dan kerusakan alam pertanian, tidak ada jalan lain, selain mengembangkan dan menerapkan sistem pertanian organik yang berbasis pada sumber daya (lokal) petani.

Mata pelajaran sebagai nelayan serta usaha lain yang berkaitan dengan perikanan di sekitar pulau Barrang Lompo, selain di dukung oleh lingkungan alam juga oleh tradisi yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Pola kerja dan kebiasaan yang dilakukan sehubungan dengan kehidupan nelayan, masih dipengaruhi oleh cara yang dilakukan oleh orang-orang tua yang sebelumnya dan diterapkan pada kehidupan sekarang. Kehidupan nelayan yang memanfaatkan laut sebagai sumber mata pencaharian, seagaimana besar masih menggunakan teknologi tradisional dan sangat tergantung pada cuaca, arus laut dan gelombang. Dengan segala kemampuan dan kesulitannya yang dimilikinya, agar mereka selalu dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Alam lingkungan yang dianggap memberikan kehidupan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan membuat tambak dipinggir pantai. Kekayaan laut yang menghasilkan ikan hampir setiap hari merangsang penduduk sekitar untuk mengolah hasil laut sebaik-baiknya, sehingga timbul usaha di kalangan masyarakat dengan membuat ikan asin,

pindang ikan, dan ikan panggang. Usaha ini memang sangat tepat dan sesuai dengan kondisi alamnya.

Nampak adanya ketergantungan satu sama lain yang terlihat dalam kegiatan gotong royong atau kebersamaan ini terwujud dalam kegiatan dilautan maupun di darat. Pada waktu melaut dan menangkap ikan diperlukan kerja sama antarajuru kemudi, juru mesin dan seluruh anggota kapal lainnya. Di darat gotong royong dapat terlihat bila ada warga terkena musibah.

Kemajuan suatu kelompok ditentukan oleh nilai budaya yang dapat membentuk etos kerja, tetapi karena oleh kondisi lingkungan yang sangat berbahasa yang membuat kelompok itu mampu mengatasi segala hal. Etos kerja yang dibentuk demikian dapat meningkatkan produksi para nelayan yang memberikan kesejahteraan.

Pemecahan masalah ekonomi dan politik serta budaya yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, semua pihak telah memberikan rambu-rambu untuk tidak terjebak membuat 'bungkus baru namun isi lama'. Dari berbagai tawaran alternatif model pemberdayaan masyarakat, 'model ekonomi kerakyatan' secara teoritik telah berkembang menjadi wacana baru saat ini.

Paradigma pemberdayaan ekonomi rakyat sebenarnya bukan saja berupa tuntutan atas pembagian secara adil aset ekonomi, tetapi juga merupakan keniscayaan ideologis dengan semangat meruntuhkan dominasi-dominasi birokrasi dalam mengatur dan menentukan berbagai bidang kehidupan rakyat. (Sasono, 2000). Untuk itu, maka pemberdayaan ekonomi rakyat (dalam penerapan untuk petani dan nelayan kecil) berarti menuju kepada terbentuknya kemandirian

petani dan nelayan itu, yaitu berperilaku efisien, modern dan berdaya saing tinggi. Perilaku efisien artinya berpikir dan bertindak serta menggunakan sarana produksi secara tepat guna atau berdaya guna. Berperilaku modern artinya mengikuti dan terbuka terhadap perkembangan dan inovasi serta perubahan yang ada. Sedangkan berdaya saing tinggi yaitu mampu berpikir dan bertindak serta menggunakan sarana produksi atas dasar memperhatikan mutu hasil kerjanya dan kepuasan konsumen yang dilayaninya (Sumardjo, 1998).

Gagasan pemberdayaan ekonomi rakyat menurut Mahmudi (1999) adalah merupakan upaya mendorong dan melindungi tumbuh dan berkembangnya kekuatan ekonomi lokal dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) oleh masyarakat yang berbasiskan pada kekuatan rakyat. Muatan gagasan ini tidak saja dituntut untuk dapat mendayagunakan dan menghasilgunakan potensi sumber daya lokal untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, tetapi juga terlindunginya hak-hak rakyat dalam pengelolaan sumberdaya lokal sesuai dengan kepentingan ekonomi dan sosialnya.

Menurut Sasono (2000: 35), beberapa aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan, antara lain:

- a. Pengembangan organisasi/kelompok masyarakat yang dikembangkan dan berfungsi dalam mendinamisir kegiatan produktif masyarakat.
- b. Pengembangan jaringan strategis antar kelompok/organisasi masyarakat yang terbentuk dan berperan dalam pengembangan masyarakat tani dan nelayan, misalnya asosiasi dari organisasi petani dan nelayan, baik dalam (1) skala nasional, (2) wilayah, maupun (3) lokal.

- c. Kemampuan kelompok petani dan nelayan kecil dalam mengakses sumber-sumber luar yang dapat mendukung pengembangan mereka, baik dalam (1) bidang informasi pasar, (2) permodalan, serta (3) teknologi dan manajemen, termasuk didalamnya kemampuan lobi ekonomi. Di sinilah maka perlunya ekonomi jaringan dikembangkan. Ekonomi jaringan adalah suatu perekonomian yang menghimpun para pelaku ekonomi, baik dari produsen, konsumen, *service provider*, *equipment provider*, cargo, dan sebagainya. Ekonomi jaringan ini harus didukung oleh jaringan telekomunikasi, jaringan pembiayaan, jaringan usaha dan perdagangan, jaringan advokasi usaha, jaringan saling belajar, serta jaringan lainnya seperti hasil temuan riset dan teknologi/inovasi baru, jaringan pasar, informasi kebijakan dan pendukung lainnya yang dapat diakses oleh semua dan tidak dimonopoli oleh kelompok tertentu.
- d. Pengembangan kemampuan-kemampuan teknis dan manajerial kelompok-kelompok masyarakat, sehingga berbagai masalah teknis dan organisasi dapat dipecahkan dengan baik, yaitu (1) masyarakat (petani dan nelayan), (2) petugas penyuluh/pendamping pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kompetensi diri sebagai petugas yang mampu memberdayakan, karena banyak diantara mereka justru ketinggalan kemampuannya dengan kelompok-sasarannya.

F. Kerangka Pikir

Nelayan merupakan salah satu pelaku ekonomi usaha kecil pada subsektor perikanan. Dalam mengembangkan usahanya, sampai saat ini usaha kecil masih

terus menghadapi tantangan-tantangan yang cukup berat misalnya kemampuan mengakses pasar, permodalan, teknologi serta mutu dan kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah.

Pemberdayaan masyarakat nelayan di Pulau Barrang Lompo perlu mengadopsi keinginan semua *stakeholders* yang terkait didalamnya seperti, nelayan itu sendiri, pemerintah desa, tokoh masyarakat yang berada diwilayah itu karena berbagai program yang telah dicanangkan hingga kini belum memperlihatkan hasil yang optimal. Hal ini terlihat dari kondisi kesejahteraan masyarakat nelayan yang belum membaik. Oleh karena itu peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat nelayan; sebagai indikator yaitu: 1) Pengembangan organisasi/kelompok, 2) Pengembangan jaringan strategis antar kelompok/organisasi masyarakat, 3) Kemampuan kelompok petani dan nelayan kecil dalam mengakses sumber-sumber luar, dan 4) Pengembangan kemampuan-kemampuan teknis dan manajerial kelompok-kelompok masyarakat mutlak harus dilakukan demi kesejahteraan masyarakat nelayan di Pulau Barrang Lompo Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka kerangka pikir dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

1. Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat yaitu upaya dalam menyelesaikan permasalahan para nelayan dan pengelolaan kemampuan sumberdaya sosial ekonomi lokal serta pemanfaatannya.
2. Pengembangan organisasi/kelompok yaitu: (a) memperhatikan berbagai persoalan sosial, (b) ekonomi, dan (c) yang dihadapi oleh masyarakat pesisir.
3. Pengembangan jaringan strategi antar kelompok/organisasi masyarakat yaitu: pembedayaan yang dilakukan untuk partisipasi masyarakat lebih baik terhadap pengaruh politik di era otonomi daerah, yaitu: asosiasi dari organisasi petani dan nelayan dalam (a) skala nasional, (b) wilayah, maupun (c) lokal.

4. Kemampuan kelompok petani dan nelayan kecil dalam mengakses sumber-sumber luar yaitu kemampuan dalam mengakses pengetahuan tentang: (a) informasi pasar, (b) permodalan, dan (c) teknologi dan manajemen.
5. Pengembangan kemampuan teknis dan manajerial sehingga berbagai masalah teknis dan organisasi dapat dipecahkan dengan baik, yaitu sasarannya: (a) petani dan nelayan, (b) juga para petugas penyuluh/pendamping pemberdayaan masyarakat harus meningkatkan kompetensi diri.
6. Masyarakat nelayan mandiri dan sejahtera didukung oleh usaha yang dikelola sendiri dengan memanfaatkan laut sebagai sumber mata pencaharian.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan di wilayah nelayan yang ada di Pulau Barrang Lompo Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar sebagai alasan adalah, sebagian besar profesi penduduk yang tinggal di pulau tersebut bekerja sebagai nelayan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data berupa pernyataan atau penilaian informan mengenai bagaimana peran pemerintah dalam pengembangan potensi perikanan darat di Pulau Barrang Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar sedangkan data kuantitatif yaitu data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud dengan persentase.

Dalam penelitian kuantitatif, permasalahan yang diteliti sudah jelas realitas dianggap tunggal, tetap teramati, pola pikir deduktif sedangkan metode kualitatif bahwa realitas dipandang sesuatu holistik, kompleks, dinamis, penuh makna dan pola pikir induktif, sehingga permasalahan belum jelas yang dibuat masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki obyek penelitian/situasi sosial (Sugiyono, 2013:287).

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah *survey* yang berupaya menggambarkan secara umum tentang fakta sehubungan dengan beban kerja. Hal tersebut dilakukan dengan memahami gejala-gejala yang diteliti serta menganalisa apa yang didengar, mempelajari proses penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut berdasarkan konteks ruang dan waktu serta situasi secara alami.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Sugiyono (2012: 119) mendefinisikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki nilai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian akan ditarik kesimpulan dari penelitian tersebut. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan nelayan yang ada di Pulau Barrang Lompo. Adapun jumlah nelayan yang ada di Pulau Barrang Lompo berjumlah 73 orang.

2. Sampel

Sugiyono (2012: 120) mengemukakan sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan

sampel yang diambil dari populasi itu. Adapun teknik sampel yang digunakan yaitu *sampling insidental*, menurut Sugiyono (2012: 126) teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Berdasarkan jumlah populasi di atas, maka penulis mengambil sampel dengan rincian sebagai berikut:

Dengan taraf signifikan $\alpha = 0,10$ (10%)

$N = 73$

$$n = \frac{N}{1 + \sqrt{N}} = \frac{73}{1 + \sqrt{73}} = \frac{73}{1 + 8,54} = \frac{73}{9,54} = 7,65$$

dibulatkan menjadi 42 sebagai sampel.

Informan:

1. Kepala Lurah = 1 orang
2. Sekretaris Pulau Barrang Lompe
3. Tokoh masyarakat = 3 orang

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

a. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data berupa pernyataan atau penilaian informan mengenai bagaimana peran pemerintah dalam pengembangan potensi perikanan darat di Pulau Barrang Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.

b. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang bersifat angka-angka yang bersumber dari hasil transformasi data kualitatif yang memiliki perbedaan berjenjang.

2. Sumber data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti melalui hasil observasi dan Wawancara mendalam (*In-depth interview*) dengan responden terhadap masalah yang diteliti.
- b. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari dokumen-dokumen dan laporan-laporan yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Angket

Angket adalah daftar pertanyaan secara tertulis yang diberikan kepada responden dan selanjutnya responden memberikan jawaban secara langsung dengan memilih jawaban pada pertanyaan yang sudah tersedia. Adapun responden yang diberi daftar pertanyaan adalah ketua dan anggota kelompok nelayan.

2. Wawancara

Wawancara mendalam (*In-depth interview*) digunakan oleh peneliti sebagai acuan dalam melakukan wawancara secara langsung dengan informan, yakni Kepala desa.

3. Observasi

Adalah teknik pengumpulan data yang ada di lapangan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif dan kualitatif, analisis kuantitatif dengan menggunakan tabel-tabel frekuensi yaitu menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dan menyajikan dalam bentuk angka-angka tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum, hasilnya diuraikan secara kualitatif dengan memberikan gambaran mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan nelayan terhadap data yang di Pulau Barrang Lompo diperoleh melalui kuesioner, selanjutnya dipastikan jawaban responden berdasarkan total skor masing-masing jawaban. Dari data tersebut dilakukan analisis deskriptif melalui perhitungan persentase dan sistem skor untuk mengetahui komposisi jawaban responden yang kemudian disempurnakan kevalidannya melalui teknik analisis kualitatif.

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert dikembangkan oleh Rensis Likert (1932) yang paling sering digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi responden terhadap suatu objek Husaini Usman & Purnomo Setiady dalam Hindar Jaya (2013: 43).

Analisis persentase rumus perhitungan skor untuk setiap item pertanyaan, yaitu:

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase

N = Jumlah Responden

F = Frekuensi

Selain tabel frekuensi, analisa data juga dilakukan dengan menggunakan skala Likert yang sering digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi responden terhadap suatu objek.

$$\bar{X} = \frac{\sum(X.F)}{N}$$

Keterangan:

\bar{X} = Rata-rata skor

Σ = Jumlah

X = Skor

F = Frekuensi

N = Jumlah Responden

Pemberian skor dimulai dari nilai tertinggi dengan 4 dan skor terendah 1.

Klasifikasi antara lain sebagai berikut:

Klasifikasi	Skor
Selalu tepat waktu/selalu ada pemberitahuan/selalu menggunakan/selalu menjelaskan/selalu memberikan/sangat jelas/sangat sesuai/sangat menguasai/sangat baik/sangat menarik/sangat berperan/sangat bersemangat/sangat sesuai/sangat transparansi/sangat objektif	4
Sering tepat waktu/sering ada pemberitahuan/sering menggunakan/sering menjelaskan/sering memberikan/jelas sesuai/menguasai/baik/menarik/memberitahu/berperan/objektif/bersemangat	3
Kadang-kadang tepat waktu/kadang-kadang ada pemberitahuan/kadang-kadang menggunakan/kadang-kadang memberikan/kadang-kadang menjelaskan/kurang jelas/kurang sesuai/kurang menguasai/kurang baik/kurang menarik/kurang berperan.kurang objektif/kurang bersemangat/kurang	2

transparansi	
Tidak pernah tepat waktu/tidak pernah ada pemberitahuan/tidak pernah menggunakan/tidak pernah menjelaskan/tidak pernah memberikan/tidak jelas/tidak sesuai/tidak menguasai/tidak baik/tidak menarik/tidak berperan/tidak objektif/tidak bersemangat/tidak transparansi	1

Mengetahui baik atau tidaknya peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan, maka digunakan suatu ukuran sebagai berikut:

Rumus interval:

$$\begin{aligned}
 I_n &= \frac{Jc}{J_u} = \frac{p}{h} = \frac{K}{h} \\
 &= \frac{S_{te} - S_{te}}{h} \\
 &= \frac{4 - 1}{4} = 0,75
 \end{aligned}$$

Oleh karenanya itu, kategori dari data yang dihasilkan akan diuraikan sebagai berikut:

Kategorisasi Tanggapan Responden	Nilai Skor	Interval Rata-Rata Skor	Interval Rata-Rata Persentase
Sangat Baik	4	3,26 – 4,00	81,50% – 100,00%
Baik	3	2,51 – 3,25	62,75% – 81,25%
Kurang Baik	2	1,76 – 2,50	44,00% – 63,50%
Tidak Baik	1	1,00 – 1,75	25,00% – 43,75%

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Barrang Lompo adalah salah satu pulau yang ada di pesisir laut selat Makassar, nama pulau Barrang Lompo tidak sepopuler pulau-pulau di sekitarnya seperti pulau Samalona, Taka Paotere atau Taka Bonerate. Barrang Lompo termasuk dalam pulau-pulau karang di lepas pantai Ujung Pandang yang berbatasan dengan Gusung Bone Battang. Pulau ini mempunyai taman laut yang sangat indah dan menarik. Di pulau Barrang Lompo juga terdapat peninggalan Jepang berupa oseanorium yang berpotensi untuk pariwisata. Selain itu, pulau Barrang Lompo memiliki letak geografis yang dekat dengan kota Makassar dan memiliki sumber mata air tawar sehingga menjadikan pulau ini padat dan banyak dihuni oleh nelayan, pelayar dan beberapa keluarga perajin perak tradisional.

Pulau Barrang Lompo yang memiliki luas 49 hektar, memiliki penduduk yang cukup padat. Pada umumnya warga pulau Barrang Lompo bermata pencaharian sebagai nelayan teripang, pulau Barrang Lompo berjarak 12 km dari kota Makassar, untuk ke pulau ini dapat ditempuh 1 jam perjalanan ke arah barat dari dermaga Kayu Bangkoa. Pulau Barrang Lompo berbatasan dengan pulau Barrang Caddi di sebelah selatan dan pulau Bonetambung di sebelah barat. Untuk aktivitas *snorkeling* pulau Barrang Lompo tidak begitu menarik, walaupun ingin mencoba di sebelah selatan pulau.

2. Mata Pencaharian

Lokasi pulau Barrang Lompo yang berada di pesisir pantai membuat masyarakatnya lebih banyak bermata pencaharian sebagai nelayan tapi masih banyak masyarakat bermata pencaharian sebagai seorang penyelam teripang. Kehidupan komunitas nelayan yang hanya memiliki perahu tradisional dengan dilengkapi alat tangkap sederhana, seperti pancing, jaring dan bubu. Modifikasi bubu yang dulunya terbuat dari bambu sekarang terbuat dari besi. Alasannya, karena hasil tangkapan lebih banyak serta ongkos pembuatannya yang terbilang murah.

Pada beberapa lokasi di perairan pulau ini ekosistem lamunnya cukup baik yang berasosiasi dengan beberapa biota lain seperti sponge dan ikan. Sedangkan untuk ekosistem karang ada sebagian karangnya sudah ikut hancur akibat eksploitasi yang tidak ramah lingkungan. Di pulau ini juga dilaksanakan rehabilitasi lamun untuk menjaga ekosistem lamun menjadi lebih baik.

B. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini terdiri atas Ketua dan Anggota masyarakat nelayan, dan Kepala Desa. Identitas responden dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan responden yang dapat mencerminkan variasi sikap, perilaku dan tanggapan terhadap Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Nelayan di Pulau Barang Lompo Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.

Identitas responden perlu diketengahkan untuk memberikan gambaran tentang sumber data serta untuk melihat keabsahan atau validitas data yang telah diperoleh dari responden bersangkutan.

1. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden yang digambarkan berdasarkan jenis kelamin, dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman serta mengetahui perbedaan persepsi terhadap fenomena yang berkaitan dengan peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan di Pulau Barrang Lompo Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. Berdasarkan kuesioner yang telah disebarluaskan kepada responden, maka diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase %
Laki-laki	31	73,81
Perempuan	11	26,19
Jumlah	42	100

Sumber : Hasil olahan data primer September 2015

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 42 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 31 orang (73,81%) dan 11 orang (26,19%) yang terdiri dari responden perempuan.

2. Karakteristik Responden menurut Umur

Identitas responden dapat dilihat pada pengelompokan umur yang dapat menggambarkan sikap dan perilaku responden terutama dalam melakukan penilaian. Dari 91 responden yang ada, maka diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 2. Karakteristik Responden menurut Kelompok Umur

Umur	Frekuensi	Persentase %
< 20 Tahun	11	26,19
21- 35 Tahun	8	19,05
36 – 50 Tahun	9	21,43
> 51 Tahun	14	33,33
Jumlah	42	100

Sumber : Hasil olahan data primer September 2015

Berdasarkan pada tabel di atas diketahui bahwa yang menjadi responden terbanyak dalam penelitian ini adalah dengan karakteristik umur yaitu <20 tahun hanya ada 11 orang (26,19%), diantara 21 – 35 tahun yaitu sebanyak 8 orang (19,05%) kemudian yang berumur antara 36 – 50 tahun yaitu sebanyak 9 orang (21,43%) dan responden yang berumur lebih dari 51 tahun hanya 14 orang (33,33%).

Jika diperhatikan karakteristik responden dalam tabel 5 diatas dapat dikatakan bahwa dominan yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah yang berumur antara 36 – 50 tahun dan lainnya yang berumur antara 21 – 35 tahun. Dari karakteristik umur responden tersebut dapat dikatakan bahwa pada umumnya responden yang ada cukup relevan dalam memberikan pendapat.

3. Karakteristik Reponden menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan responden berpengaruh secara signifikan terhadap pandangan atau sikap responden terhadap jawaban yang diberikan. Pendidikan yang cukup tinggi yang dimiliki responden tentu memiliki pengetahuan yang berbeda dengan responden yang tingkat pendidikannya rendah. Karakteristik responden menurut tingkat pendidikan, sebagai berikut:

Tabel 3. Karakteristik Responden menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase %
SD	8	19,05
SMP	11	26,19
SMA	9	21,43
S1	14	33,33
Jumlah	42	100

Sumber : Hasil olahan data primer September 2015

Berdasarkan pada tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden memiliki jenjang pendidikan terakhir adalah SD yaitu sebanyak 8 orang (19,05%). Kemudian SMP sebanyak 11 orang (26,19%). Kemudian untuk jenjang pendidikan terakhir SMA yaitu sebanyak 9 orang (21,43%) dan untuk jenjang pendidikan terakhir Sarjana sebanyak 14 orang (33,33%).

4. Karakteristik Reponden menurut Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan responden berpengaruh secara signifikan terhadap pandangan atau sikap responden terhadap jawaban yang diberikan. Pendapatan yang cukup tinggi yang dimiliki responden tentu memiliki pengetahuan yang berbeda dengan responden yang tingkat kehidupannya. Karakteristik responden menurut tingkat pendapatan, sebagai berikut:

Tabel 4. Karakteristik Responden menurut Tingkat Pendapatan

Tingkat Pendapatan	Frekuensi	Persentase %
< 5.000.000	6	14,29
> 5.000.000	9	21,43
> 10.000.000	11	26,19
>30.000.000	16	38,10
Jumlah	42	100

Sumber : Hasil olahan data primer September 2015

Berdasarkan pada tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pendapatan terakhir yaitu < 5.000.000 sebanyak 6 orang (14,29%), kemudian > 5.000.000 sebanyak 9 orang (21,43%). Kemudian untuk pendapat > 10.000.000 yaitu sebanyak 11 orang (26,19%) dan untuk pendapatan >30.000.000 sebanyak 16 orang (38,10%).

5. Karakteristik Responden menurut Tingkat Pekerjaan

Tingkat pekerjaan responden berpengaruh secara signifikan terhadap pandangan atau sikap responden terhadap jawaban yang diberikan. Pendapatan yang cukup tinggi yang dimiliki responden tentu memiliki pengetahuan yang berbeda dengan responden yang tingkat kehidupannya. Karakteristik responden menurut tingkat pendapatan, sebagai berikut:

Tabel 5. Karakteristik Responden menurut Tingkat Pekerjaan

Tingkat Pekerjaan	Frekuensi	Persentase %
PNS	14	33,33
Berdagang/Berniaga	11	26,19
Nelayan	17	40,48
Jumlah	42	100

Sumber: Hasil olahan data primer September 2015

Berdasarkan pada tabel di atas diketahui bahwa responden yang memiliki tingkat pekerjaan yaitu sebagai PNS sebanyak 14 orang (33,33%), kemudian berdagang/berniaga sebanyak 11 orang (26,19%). Kemudian untuk pekerjaan sebagai nelayan sebanyak 17 orang (40,48%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa mayoritas warga di Pulau Barrang Lompo pekerjaannya sebagai nelayan.

C. Narasi Rumusan Isi

Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Nelayan di Pulau Barrang Lompo Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar untuk menciptakan masyarakat nelayan yang mandiri dengan melalui empat tahapan antara lain: 1) Pengembangan organisasi/kelompok, 2) Pengembangan jaringan strategis antar

kelompok/organisasi masyarakat, 3) Kemampuan kelompok petani dan nelayan kecil dalam mengakses sumber-sumber luar, dan 4) Pengembangan kemampuan-kemampuan teknis dan manajerial kelompok-kelompok masyarakat.

1. Pengembangan organisasi/kelompok yaitu:

Merupakan upaya mendorong dan melindungi tumbuh dan berkembangnya kekuatan ekonomi lokal dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) oleh masyarakat yang berbasiskan pada kekuatan rakyat, ada tiga indikator penilaian yaitu: a) memperhatikan berbagai persoalan sosial, b) ekonomi, dan c) yang dihadapi oleh masyarakat pesisir.

a. Memperhatikan Berbagai Persoalan Sosial,

Persoalan sosial menjadi keniscayaan bagi semua upaya pemberdayaan masyarakat, jika tidak dibarengi munculnya kelembagaan sosial, ekonomi dan budaya yang benar-benar diciptakan oleh masyarakat sendiri. Misalnya lumbung desa dan organisasi lokal lainnya dipersilahkan tetap hidup.

Tabel 6 Tanggapan Responden terhadap Perhatian Pemerintah dengan Berbagai Persoalan Sosial yang dihadapi Nelayan di Pulau Barrang Lompo

No.	Tanggapan Reponden	Skor (X)	F	X.F	%
1	Sangat memperhatikan	4	0	0	0
2	Memperhatikan	3	6	18	14,29
3	Kurang memperhatikan	2	32	64	76,19
4	Tidak memperhatikan	1	4	4	9,52
Total			42	86	100
Rata-rata Skor			$\frac{86}{42} = 2,05$		
Rata-rata Persen			$\frac{2,05}{4} = 51,19\%$		

Sumber: Hasil olahan data primer September 2015

Pada tabel 6 di atas, menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap perhatian mengenai persoalan sosial di masyarakat, yaitu dari 42 responden, dimana tidak ada responden (0%) yang menanggapi sangat memperhatikan, 6 responden (14,29%) menanggapi memperhatikan, 32 responden (76,19%) menanggapi kurang memperhatikan, dan 4 responden (9,52%) menanggapi tidak memperhatikan serta tidak ada responden yang memilih pemerintah sangat memperhatikan persoalan sosial. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata skor 2,05 (51,19%) atau kategori kurang baik. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis melakukan wawancara dengan lurah pulau Barrang Lompo yang mengatakan bahwa:

Pemerintah belum secara maksimal memperhatikan persoalan sosial di masyarakat pulau ini karena pemerintah belum melakukan kerjasama mengenai penjualan hasil tangkapan nelayan. (Hasil wawancara dengan BUR, 28 September 2015)

b. Ekonomi,

Peristiwa ekonomi juga merupakan peristiwa politik, maka tindakan yang hanya berorientasi memberikan bantuan teknis jelas tidak memadai. Pemberdayaan yang diperlukan adalah tindakan berbasis pada kesadaran masyarakat untuk membebaskan diri dari belenggu kekuatan ekonomi yang menghambat pengembangan kemandirian petani dan nelayan kecil merupakan sesuatu yang sangat diperlukan.

Tabel 7 Tanggapan Responden terhadap Kestabilan Pemerintah dengan Persoalan Ekonomi yang dihadapi Nelayan di Pulau Barrang Lompo

No.	Tanggapan Reponden	Skor (X)	F	X.F	%
1	Sangat stabil	4	4	16	9,52
2	Stabil	3	19	57	45,24
3	Kurang stabil	2	14	28	33,33
4	Tidak stabil	1	5	5	11,90
Total			42	106	100
Rata-rata Skor			$\frac{106}{42} = 2,52$		
Rata-rata Persen			$\frac{2,52}{4} = 63\%$		

Sumber: Hasil olahan data primer September 2015

Pada tabel 7 di atas, menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap perhatian mengenai persoalan ekonomi di masyarakat, yaitu dari 42 responden, dimana 4 responden (9,52%) menanggapi sangat stabil, 19 responden (45,24%) menanggapi stabil, 14 responden (33,33%) menanggapi kurang stabil, dan 5 responden (11,90%) menanggapi tidak memperhatikan persoalan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata skor 2,52 (63%) atau kategori baik. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis melakukan wawancara dengan salah satu nelayan bernama ZND yang tinggal di pulau Barrang Lompo yang mengatakan bahwa:

Pemerintah belum secara maksimal memberikan bantuan permasalahan ekonomi yang dialami nelayan di Pulau Barrang Lompo karena kebanyakan nelayan belum punya modal yang cukup dalam mengelola hasil tangkapannya. (Hasil wawancara dengan ZND, 28 September 2015)

c. Masyarakat Pesisir,

Masyarakat yang hidup dan mencari penghidupan bergantung dengan hasil nelayan. Pada musim paceklik, berdasarkan fenomena yang berkembang,

sebagian istri nelayan/masyarakat pesisir dengan terpaksa menjual segala barang rumah tangga yang dianggap berharga atau menggadaikannya ke lembaga-lembaga pegadaian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Tabel 8 Tanggapan Responden terhadap Konsisten Pemerintah dengan permasalahan sebagai masyarakat pesisir di Pulau Barrang Lompo

No.	Tanggapan Reponden	Skor (X)	F	X.F	%
1	Sangat konsisten	4	0	0	0
2	Konsisten	3	10	30	23,81
3	Kurang konsisten	2	32	64	76,19
4	Tidak konsisten	1	0	0	0
Total			42	94	100
Rata-rata Skor			$\frac{94}{42} = 2,24$		
Rata-rata Persen			$\frac{2,24}{4} = 56\%$		

Sumber: Hasil olahan data primer September 2015

Pada tabel 8 di atas, menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap kondisi sebagai masyarakat pesisir, yaitu dari 42 responden, dimana tidak ada responden (0%) menanggapi sangat konsisten dan tidak konsisten, 10 responden (23,81%) menanggapi konsisten, 32 responden (76,19%) menanggapi kurang konsisten. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata skor 2,24 (56%) atau berada dalam kategori kurang baik. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis melakukan wawancara dengan lurah pulau Barrang Lompo yang mengatakan bahwa:

Nelayan di Pulau Barrang Lompo, sebagai masyarakat pesisir yang hidup di pulau masih jauh dari kehidupan yang sejahtera karena mereka masih menggunakan alat-alat tangkapan yang masih tradisional. (Hasil wawancara dengan BUR, 28 September 2015)

2. Pengembangan jaringan strategi antar kelompok/organisasi masyarakat

Yaitu: pemberdayaan yang dilakukan untuk partisipasi masyarakat lebih baik terhadap pengaruh politik di era otonomi daerah, misalnya asosiasi dari organisasi petani dan nelayan, yaitu: a) dalam skala nasional, b) wilayah, maupun c) lokal.

a. Skala nasional,

Dalam skala nasional pemerintah lebih menekankan pada kesamaan dan perbedaan potensi yang dimiliki oleh semua wilayah. Dengan pendekatan ini akan memungkinkan terjadinya pemberdayaan masyarakat dalam skala besar dan lebih lanjut akan memungkinkan terjadinya kerjasama antar wilayah yang lebih produktif.

Tabel 9 Tanggapan Responden terhadap Pengembangan Jaringan Strategi antar Kelompok/Organisasi Masyarakat dalam Skala Nasional di Pulau Barrang Lompo

No.	Tanggapan Reponden	Skor (X)	F	X.F	%
1	Sangat mengembangkan jaringan	4	0	0	0
2	Mengembangkan jaringan	3	0	0	0
3	Kurang mengembangkan jaringan	2	9	18	21,43
4	Tidak mengembangkan jaringan	1	33	33	78,57
Total			42	51	100
Rata-rata Skor			$\frac{51}{42} = 1,21$		
Rata-rata Persen			$\frac{1,21}{4} = 30,36\%$		

Sumber: Hasil olahan data primer September 2015

Pada tabel 9 di atas, menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap pengembangan jaringan strategi antar kelompok/organisasi dalam skala nasional, yaitu dari 42 responden, dimana tidak ada responden (0%) menanggapi sangat mengembangkan dan mengembangkan jaringan,

9responden (21,43%) menanggapi kurang mengembangkan jaringan dan 33 responden (78,57%) menanggapi tidak mengembangkan jaringan strategi antar kelompok/organisasi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata skor 1,21 (30,36%) atau berada pada kategori tidak baik. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis melakukan wawancara dengan lurah pulau Barrang Lompo yang mengatakan bahwa:

Pemerintah belum secara maksimal memperhatikan persoalan sosial di masyarakat pulau ini karena pemerintah belum melakukan kerjasama mengenai penjualan hasil tangkapan nelayan. (Hasil wawancara dengan BUR, 28 September 2015)

b. Wilayah

Pengembangan jaringan strategi antar kelompok/organisasi masyarakat secara wilayah, yaitu lebih menekankan pada kesamaan dan perbedaan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah tertentu. Dengan pendekatan ini akan memungkinkan terjadinya pemberdayaan masyarakat dalam skala besar dan lebih lanjut akan memungkinkan terjadinya kerjasama antar wilayah yang lebih produktif.

Tabel 10 Tanggapan Responden terhadap Strategi antar Kelompok/Organisasi dalam Lingkup Wilayah di Pulau Barrang Lompo

No.	Tanggapan Reponden	Skor (X)	F	X.F	%
1	Sangat strategi	4	0	0	0
2	Strategi	3	7	21	16,67
3	Kurang strategi	2	28	56	66,67
4	Tidak strategi	1	7	7	16,67
Total			42	84	100
Rata-rata Skor			$\frac{84}{42} = 2$		
Rata-rata Persen			$\frac{2}{4} = 50\%$		

Sumber: Hasil olahan data primer September 2015

Pada tabel 10 di atas, menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap pengembangan jaringan strategi antar kelompok/organisasi dalam skala wilayah yaitu dari 42 responden, dimana tidak ada responden (0%) menanggapi sangat strategi, 7 responden (16,67%) mengembangkan jaringan strategi, 28 responden (66,67%) menanggapi kurang mengembangkan jaringan dan 7 responden (16,67%) menanggapi tidak mengembangkan jaringan strategi antar kelompok/organisasi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata skor 2 (50%). Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis melakukan wawancara dengan sekretaris lurah pulau Barrang Lompo yang mengatakan bahwa:

Pemerintah daerah/kota masih kurang mengembangkan jaringan dalam wilayah yang lebih luas karena hasil tangkapan nelayan hanya terbatas pada dermaga yang tidak jauh dari jalur ke Pulau Barrang Lompo, sehingga kebanyakan ikan hasil tangkapan sebagian dikeringkan sendiri dengan mengandalkan panas matahari. (Hasil wawancara dengan NUR, 28 September 2015)

c. Lokal

Pengembangan sektor ekonomi strategis sesuai dengan kondisi lokal (daerah). Karena masing-masing daerah potensinya berbeda, maka kebijakan yang akan diberlakukan juga berbeda antar daerah. Pemberlakuan kebijakan secara seragam untuk semua daerah harus ditinggalkan.

Tabel 11 Tanggapan Responden terhadap Motivasi Sektor Ekonomi sesuai dengan Kondisi Lokal di Pulau Barrang Lompo

No.	Tanggapan Reponden	Skor (X)	F	X.F	%
1	Sangat termotivasi	4	0	0	0
2	Termotivasi	3	9	27	21,43

3	Kurang termotivasi	2	33	66	78,57
4	Tidak termotivasi	1	0	0	0
Total			42	93	100
Rata-rata Skor			$\frac{93}{42} = 2,21$		
Rata-rata Persen			$\frac{2,21}{4} = 55,36\%$		

Sumber: Hasil olahan data primer September 2015

Pada tabel 11 di atas, menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap pengembangan jaringan strategi antar kelompok/organisasi dalam skala lokal yaitu dari 42 responden, dimana tidak ada responden (0%) menanggapi sangat termotivasi, 9 responden (21,43%) mengembangkan motivasi, 33 responden (78,57%) menanggapi kurang termotivasi dan tidak ada responden (0%) menanggapi tidak termotivasi dengan jaringan strategi antar kelompok/organisasi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata skor 2,21 (55,36%) atau berada pada kategori kurang baik.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis melakukan wawancara dengan salah satu nelayan berinisial BSR yang berada di Pulau Barrang Lompo yang mengatakan bahwa:

Pemerintah belum secara maksimal memperhatikan persoalan sosial di masyarakat pulau ini karena produksi lokal yang berada di Pulau Barrang Lompo masih belum dilirik oleh investor atau penjual ikan yang berada di kota. (Hasil wawancara dengan BSR, 28 September 2015)

3. Kemampuan kelompok petani dan nelayan kecil dalam mengakses sumber-sumber luar yaitu kemampuan dalam mengakses pengetahuan tentang: a) informasi pasar, b) permodalan, dan c) teknologi dan manajemen.
 - a. Informasipasar

Jaringan infrastruktur telekomunikasi dan sistim informasi pendukungnya yang memanfaatkan seperti internet untuk membuka pintu gerbang seluas-luasnya bagi petani dan nelayan atas informasi yang diperlukan bagi pengembangan usahanya setidaknya melalui mediasi para petugas penyuluh/pendamping pemberdayaan masyarakat).

Tabel 12 Tanggapan Responden terhadap Informasi Pasar untuk Meningkatkan Kemampuan Kelompok Petani dan Nelayan Kecil di Pulau Barrang Lompo

No.	Tanggapan Reponden	Skor (X)	F	X.F	%
1	Selalu mengembangkan informasi pasar	4	0	0	0
2	Mengembangkan informasi pasar	3	11	33	26,19
3	Kurang mengembangkan informasi pasar	2	31	62	73,81
4	Tidak mengembangkan informasi pasar	1	0	0	0
Total			42	95	100
Rata-rata Skor			$\frac{95}{42} = 2,26$		
Rata-rata Persen			$\frac{2,26}{4} = 56,55\%$		

Sumber: Hasil olahan data primer September 2015

Pada tabel 12 di atas, menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap informasi pasar yaitu dari 42 responden, dimana tidak ada responden (0%) menanggapi selalu mengembangkan informasi pasar, 11 responden (26,19%) mengembangkan mengembangkan informasi pasar, 31 responden (73,81%) menanggapi kurang mengembangkan informasi pasar dan tidak ada responden (0%) menanggapi tidak mengembangkan informasi pasar. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata skor 2,26 (56,55%).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis melakukan wawancara dengan salah satu nelayan yang bernama BHR yang juga tinggal di pulau Barrang Lompo, mengatakan bahwa:

Pemerintah dalam memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat di pulau Barrang Lompo dalam hal informasi pasar, kami merasa masih tinggal jauh dari penghasilan nelayan yang berada di pulau lain yang teknik penangkapannya sudah memakai peralatan modern. (Hasil wawancara dengan BHR, 28 September 2015)

- b. Permodalan, yaitu seluk beluk mengenai pemakaian uang sebagai pokok untuk berdagang yang dapat dipergunakan untuk menambah penghasilan dan keuntungan yang cukup untuk kehidupan.

Tabel 13 Tanggapan Responden terhadap Permodalan untuk Meningkatkan Kemampuan Kelompok Petani dan Nelayan Kecil di Pulau Barrang Lompo

No.	Tanggapan Reponden	Skor (X)	F	X.F	%
1	Selalu memberikan modal	4	0	0	0
2	Memberikan modal	3	11	33	26,19
3	Kurang memberikan modal	2	27	54	64,29
4	Tidak memberikan modal	1	4	4	9,52
Total			42	91	100
Rata-rata Skor			$\frac{91}{42} = 2,17$		
Rata-rata Persen			$\frac{2,17}{4} = 54,17\%$		

Sumber: Hasil olahan data primer September 2015

Pada tabel 13 di atas, menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap permodalan yaitu dari 42 responden, dimana tidak ada responden (0%) menanggapi selalu permodalan, 11 responden (26,19%) permodalan, 27

responden (64,29%) menanggapi kurang permodalan dan 4 responden (9,52%) menanggapi tidak permodalan. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata skor 2,17 (54,17%).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis melakukan wawancara dengan lurah pulau Barrang Lompo yang mengatakan bahwa:

Pemerintah belum secara maksimal memperhatikan mengenai bantuan dana/modal usaha. Kebanyakan modal usaha yang mengalir di masyarakat nelayan di Pulau Barrang Lompo adalah modal yang berasal dari LPM dan BKM. (Hasil wawancara dengan BUR, 28 September 2015)

c. Teknologi dan manajemen.

Ekonomi jaringan adalah suatu perekonomian yang menghimpun para pelaku ekonomi, baik dari produsen, konsumen, service provider, equipment provider, cargo, dan sebagainya di dalam jaringan yang terhubung baik secara elektronik maupun melalui berbagai forum usaha yang aktif dan dinamis.

Tabel 14 Tanggapan Responden terhadap Teknologi dan Manajemen untuk Meningkatkan Kemampuan Kelompok Petani dan Nelayan kecil di Pulau Barrang Lompo

No.	Tanggapan Reponden	Skor (X)	F	X.F	%
1	Selalu menciptakan teknologi dan manajemen	4	0	0	0
2	Menciptakan teknologi dan manajemen	3	0	0	0
3	Kurang menciptakan teknologi dan manajemen	2	32	64	76,19
4	Tidak menciptakan teknologi dan manajemen	1	10	10	23,81
Total			42	74	100
Rata-rata Skor			$\frac{74}{42} = 1,76$		
Rata-rata Persen			$\frac{1,76}{4} = 44,05\%$		

Sumber: Hasil olahan data primer September 2015

Pada tabel 14 di atas, menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap permodalan yaitu dari 42 responden, dimana tidak ada responden (0%) menanggapi selalu menciptakan teknologi dan manajemen, 32 responden (76,19%) menanggapi kurang menciptakan teknologi dan manajemen dan 10 responden (23,81%) menanggapi tidak menciptakan teknologi dan manajemen. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata skor 1,76 (44,05%). Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis melakukan wawancara dengan lurah pulau Barrang Lompo yang mengatakan bahwa:

Dalam hal pemberian teknologi dan manajemen, pemerintah tidak pernah memberikan bantuan teknologi dan manajemen dalam pengelolaan modal usaha. Justau, kebanyakan bantuan teknologi selalu dilakukan oleh LPM atau BKM. (Hasil wawancara dengan BUR, 28 September 2015)

Hal senada juga disampaikan oleh sekretaris Lurah Pulau Barrang Lompo, yaitu:

Pemberian teknologi dan manajemen sudah pernah dilakukan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat, yaitu cara pengolahan abon ikan, ikan-ikan kering supaya tidak terlalu asin. (Hasil wawancara dengan NUR, 28 September 2015)

4. Pengembangan kemampuan teknis dan manajerial sehingga berbagai masalah teknis dan organisasi dapat dipecahkan dengan baik, yaitu sasarannya: a) petani dan nelayan, dan b) juga para petuga penyuluh/pendamping pemberdayaan masyarakat harus meningkatkan kompetensi diri.
 - a. Petani dan nelayan,

Jaringan strategis akan berfungsi untuk mengembangkan kerjasama dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki kelompok ekonomi satu dengan lainnya baik dalam bidang produksi, pemasaran, teknologi dan permodalan.

Tabel 15 Tanggapan Responden Terhadap Kemampuan Teknis dan Manajerial Petani dan Nelayan Dapat teratasi di Pulau Barrang Lompo

No.	Tanggapan Reponden	Skor (X)	F	X.F	%
1	Selalu menciptakan	4	0	0	0
2	Menciptakan	3	0	0	0
3	Kurang menciptakan	2	36	72	85,71
4	Tidak menciptakan	1	6	6	14,29
Total			42	78	100
Rata-rata Skor				$\frac{78}{42} = 1,86$	
Rata-rata Persen				$\frac{1,86}{4} = 46,43\%$	

Sumber: Hasil olahan data primer September 2015

Pada tabel 15 di atas, menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap menciptakan kemampuan teknis dan manajerial petani dan nelayan yaitu dari 42 responden, dimana tidak ada responden (0%) yang menanggapi selalu menciptakan kemampuan teknisnya dan menciptakan kemampuan teknisnya, 36 responden (85,71%) menciptakan kemampuan teknisnya, 36 responden (85,71%) menanggapi kurang menciptakan kemampuan teknisnya. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata skor 1,80 (45,05%).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis melakukan wawancara dengan lurah pulau Barrang Lompo yang mengatakan bahwa:

Jaringan strategi dalam meningkatkan kemampuan manajerial nelayan dan petani memang pemerintah belum menciptakan kemampuan manajerial karena kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. (Hasil wawancara dengan BUR, 28 September 2015)

- b. Petugas penyuluh/pendamping pemberdayaan masyarakat harus meningkatkan kompetensi diri.

Tabel 16 Tanggapan Responden Terhadap Meningkatkan Kemampuan Petugas/ Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat di Pulau Barrang Lompo

No.	Tanggapan Reponden	Skor (X)	F	X.F	%
1	Selalu meningkatkan	4	0	0	0
2	Meningkatkan	3	0	0	0
3	Kurang meningkatkan	2	10	20	23,8
4	Tidak meningkatkan	1	32	32	76,2
Total			42	52	100
Rata-rata Skor			$\frac{52}{42} = 1,24$		
Rata-rata Persen			$\frac{1,24}{4} = 32,14$		

Sumber: Hasil olahan data primer September 2015

Pada tabel 16 di atas, menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap informasi pasar yaitu dari 42 responden, dimana tidak ada responden (0%) menanggapi selalu mengembangkan informasi pasar, 10 responden (23,8%) mengembangkan mengembangkan informasi pasar, 32 responden (76,2%) menanggapi kurang mengembangkan informasi pasar dan tidak ada responden (0%) menanggapi tidak mengembangkan informasi pasar. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata skor 1,24 (32,14%).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis melakukan wawancara dengan lurah pulau Barrang Lompo yang mengatakan bahwa:

Pemerintah belum pernah melakukan penyuluhan terhadap pendampingan nelayan yang berada di pulau Barrang Lompo. Hal ini masih perlu diadakan sosialisasi kepada pemerintah setempat untuk bisa mengadakan pelatihan-pelatihan terhadap petuga/penyuluh pertanian.(Hasil wawancara dengan BUR, 28 September 2015)



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka berikut dapat ditarik kesimpulan: 1) Pengembangan organisasi/kelompok yaitu: merupakan upaya mendorong dan melindungi tumbuh dan berkembangnya kekuatan ekonomi lokal dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) oleh masyarakat yang berbasis pada kekuatan rakyat, yaitu: a) Memperhatikan berbagai persoalan sosial, hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata skor 2,05 (51,19%) masih rendah, b) Ekonomi, nilai rata-rata skor 2,52 (63,10%), dan c) Masyarakat Pesisir, hanya nilai rata-rata skor 2,24 (55,59%). Hal ini menunjukkan masih kurangnya upaya untuk melindungi tumbuh dan berkembangnya kekuatan ekonomi masyarakat. 2) Pengembangan jaringan strategi antar kelompok/organisasi masyarakat yaitu: pemberdayaan yang dilakukan untuk partisipasi masyarakat lebih baik terhadap pengaruh politik di era otonomi daerah, misalnya asosiasi dari organisasi petani dan nelayan, yaitu: a) Skala nasional dengan nilai rata-rata skor 1,21 (30,36%), b) wilayah dengan nilai rata-rata skor 2 (50%), dan c) Lokal, dengan nilai rata-rata skor 2,21 (55,36%). Hal ini menunjukkan masih rendahnya pengembangan jaringan strategis yang dilakukan oleh pemerintah. 3) Kemampuan kelompok petani dan nelayan kecil dalam mengakses sumber-sumber luar yaitu kemampuan dalam mengakses pengetahuan tentang: a) Informasi pasar. Salah satu yang sudah waktunya dibangun adalah jaringan dari nilai rata-rata skor 2,26 (56,55%), b) Permodalan,

yaitu persentase nilai rata-rata skor 2,17 (54,17%), dan c) Teknologi dan manajemen dengan nilai rata-rata skor 1,76 (44,05%). Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kemampuan petani dan nelayan kecil dalam mengakses pengetahuan informasi pasar, permodalan dan teknologi yang baik untuk mereka.

4) Pengembangan kemampuan teknis dan manajerial sehingga berbagai masalah teknis dan organisasi dapat dipecahkan dengan baik, yaitu sasarannya: a) Petani dan nelayan, dengan skor akhirnya yaitu 1,86 (46,43%), dan b) Petugas penyuluh/pendamping pemberdayaan masyarakat harus meningkatkan kompetensi diri dengan rata-rata skor 1,24 (32,14%). Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan kemampuan teknis dan manajerial yang dilakukan oleh pemerintah masih rendah dan perlu ditingkatkan.

B. Saran

Bertolak dari kesimpulan hasil penelitian diatas, penulis menyarankan

1. Hendaknya perhatian pemerintah lebih besar dalam pemberdayaan masyarakat nelayan.
2. Hendaknya masyarakat nelayan harus meningkatkan partisipasinya dalam pemberdayaan masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat nelayan mandiri dan sejahtera.
3. Hendaknya pemerintah desa harus memberikan bantuan modal usaha terhadap masyarakat nelayan secara menyeluruh di dalam meningkatkan kapasitas masyarakat nelayan.
4. Hendaknya pemerintah desa diharapkan mampu memberikan keterampilan/keahlian kepada masyarakat nelayan didalam memberdayakan

masyarakat, kewenangan dan kerjasama, serta memberikan perhatian dan kebutuhan masyarakat nelayan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukmianto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Badaruddin, dkk. 2005. *Isu-isu Kelautan: Dari Kemiskinan Hingga Bajak Laut*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahuri, Rokhmin (dkk). 2008. *Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan secara Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ginkel, Rob van. 2007. *Coastal Cultures: An Anthropology of Fishing and Whaling Traditions*. Apeldoorn: Het Spinhuis Publishers.
- Fahrudin, Adi. 2005. *Pemberdayaan, Partisipasi, dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Fithriyani, Yani. 2014. index.php?option=com_content&view=article&id=29:pembangunan-masyarakat-pesisir&catid=27:ulasan-penulis&Itemid. Diakses tanggal 12 Juli 2014.
- Hikmat A, 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Jaya, Hindar. 2013. *Pengelolaan Retribusi Pasar Sentral Sengkang di Dinar Perdagangan dan Pengelolaan Pasar di Kabupaten Wajo*. (Tidak diterbitkan)
- Khudori. 2009. *Nelayan, Kemiskinan dan Strategi Adaptasi*. Koran Tempo, 12 Maret 2009.
- Kusnadi. 2003. *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: LkiS.
- . 2006. *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Bandung: Humaniora.
- Mahmudi. 1999. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Nikijuluw, Victor P.H. 2002. *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*. Pusat Pemberdayaan dan Pembangunan Daerah. Jakarta: PT Pustaka Cidesindo.
- Rahardjo. S. 2002. *Nelayan sebuah filsafah kehidupan*. www.google.com.

- Sasono. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Konsep, Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik)* Edisi Kedua, Penerbit Graha Ilmu, Jakarta.
- Sastrawidjaya. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Cetakan V)*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua: Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono S. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- , 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sumardjo. 1998. *Kajian Model Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Desa Pantai Madura dan Kawasan Selatan Jawa Timur*. Kerjasama Lemlit Unair dengan Baitbang Propinsi Jatim.
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, pasal 18 ayat (1) dan ayat (5).
- <http://ikanbijak.wordpress.com/2008/03/14/pendekatan-sosial-dalam-pemberdayaan-nelayan/>. Diakses tgl 11/01/2014
- <http://ardaninggar.wordpress.com/2009/04/24/strategi-pemberdayaan-nelayan-berbasis-pendekatan-kultural-2/>. Diakses tanggal 29/01/2014
- <http://www.menlh.go.id/peluncuran-p1i-tahun-2014-%E2%80%9Csatukan-langkah-lindungi-ekosistem-pesisir-dari-dampak-perubahan-iklim%E2%80%9D/>. Diakses tgl 27/06/2014